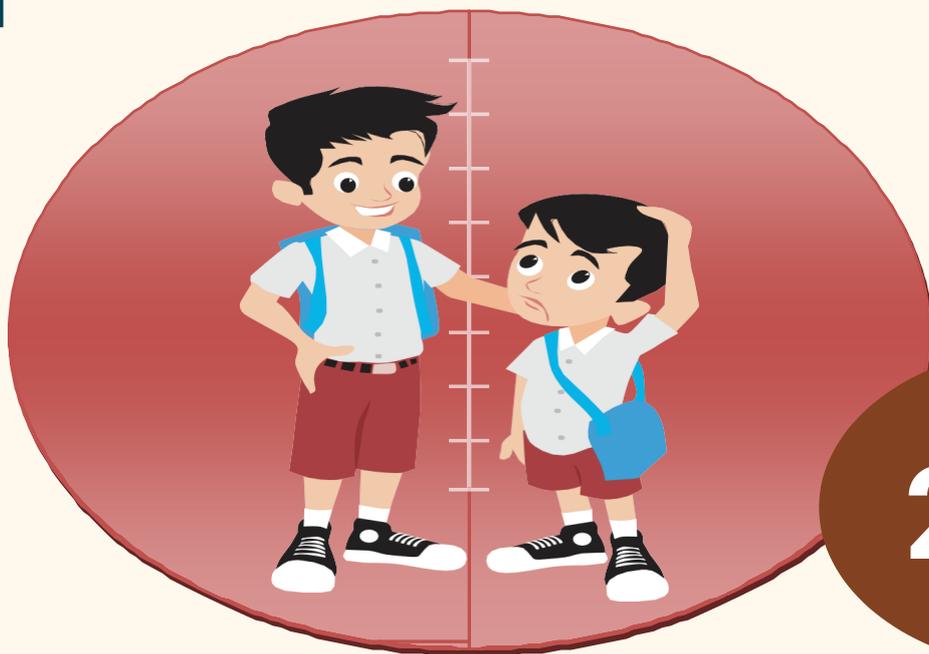




PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN SEMESTER 2

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



2023



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DI SAHKAN PADA TANGGAL DESEMBER 2023

OLEH,
WALIKOTA DUMAI
SELAKU
KETUA TIM PENGARAH TPPSKOTA

PAISAL, SKM, MARS

DISUSUN OLEH,

KETUA TIM PELAKSANA TPPS

WAKIL KETUA TPPS

SEKRETARIS TPPS

H. INDRA GUNAWAN, SIP, M.Si

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si

ELYWARTI, SKM

**KOORDINATOR BIDANG
PELAYANAN
INTERVENSI SENSITIF
DAN SPESIFIK**

**KOORDINATOR BIDANG
PERUBAHAN PERILAKU
DAN PENDAMPINGAN
KELUARGA**

**KOORDINATOR BIDANG
KOORDINASI DAN
KONVERGENSI**

**KOORDINATOR BIDANG
DATA, MONEV &
KNOWLEDGE
MANAGEMENT**

Dr. SYAIFUL, MKM

HERLINA, S.Sos, M.Si

AGUSTIAN, SE, M.Si

M. SADDAM, S.STP, M.IP

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester II di Kota Dumai merupakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai sesuai Amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencan aAKsi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021 – 2024. Laporan ini menyajikan hasil Pelaksanaan strategi nasional 5 Pilar Percepatan Penurunan Stunting dan 8 Aksi Konvergensi yang melibatkan semua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai. TPPS Kota Dumai telah mendorong TPPS Kecamatan dan Kelurahan untuk terlibat aktif, menimbulkan koordinasi antara OPD se-Kota Dumai dalam meningkatkan alokasi program dan anggaran terkait intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Spesifik serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Masa. Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan adanya kemajuan baik dalam hal partisipasi penimbangan balita serta terjadi penurunan angka stunting hasil penimbangan e-PPGBM. Laporan ini diharapkan dapat melengkapi informasi mengenai target Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Dumai berharap laporan ini dapat menjadi sarana diseminasi informasi atas kinerja intervensi penurunan stunting pada tahun 2023, sehingga dapat menjadi rujukan rekomendasi perbaikan program pada tahun mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik. Selanjutnya, Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan kinerja lebih baik sebagai perwujudan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tata kelola pemerintahan yang baik

Dumai, Desember 2023
Ketua Tim Percepatan Penurunan
Stunting Kota Dumai

H. INDRA GUNAWAN, SIP, M.Si

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Disusun Oleh	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	Ix
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik	Xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Pengorganisasian.....	5
BAB II CAPAIAN UMUM KINERJA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA DUMAI	6
2.1. Gambaran Umum Kota Dumai	6
2.2. Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	8
2.3. Hasil Analisis Situasi <i>Stunting</i> Tahun 2022.....	10
A. Kondisi Capaian Layanan Intervensi Gizi Spesifik	12
1) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita Kurus.....	13
2) Tablet Tambah Darah bagi Remaja, WUS, dan Ibu Hamil	14
3) Promosi dan Konseling Menyusui.....	14
4) Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).....	15
5) Tata Laksana Gizi Buruk	15
6) Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan	16
7) Suplementasi Mikronutrien	17
8) Pemeriksaan Kehamilan dan Imunisasi.....	17
9) Manajemen Terpadu Balita Sakit	17
B. Kondisi Capaian Layanan Intervensi Gizi Sensitif.....	18
1) Air Minum dan Sanitasi	18
2) Pelayanan Gizi dan Kesehatan	18

3) Edukasi, Konseling, dan Perubahan Perilaku	20
4) Akses Pangan Bergizi	23
C. Kondisi Capaian Indikator RAI N PASTI.....	24
1) Pendekatan keluarga beresiko <i>stunting</i>	24
2) Pendekatan multi sektor dan multi pihak melalui penta helix.....	26
3) Pendekatan intervensi gizi terpadu.....	28

BAB III CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PILAR STRATEGI NASIONAL

PERCEPATAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>.....	30
3.1. Capaian Pilar 1 Komitmen dan Visi Kepemimpinan	30
A. Media Massa	31
B. Media Sosial (Instagram)	33
3.2. Capaian Pilar 2 Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku.....	36
3.3. Capaian Pilar 3 Mendorong Konvergensi Program.....	37
3.4. Capaian Pilar 4 Ketahanan Pangan Dan Gizi.....	41
3.5. Capaian Pilar 5 Pemantauan dan Evaluasi	41
A. Publikasi tahunan angka penurunan <i>stunting</i>	41
B. Anggaran dan belanja pemerintah untuk Pencegahan Stunting.....	41
C. Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan Pemanatauan Berkala.....	53

BAB IV INOVASI DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

1. GELANG ANTING SEJULUR.....	54
2. PELITA BERANTING.....	55
3. BUKU RESEP PMT LOKAL.....	57
4. GAZING.....	58
5. SI KOMPANG MERDU.....	58
6. KATA BABA.....	59
7. CHAT MIL.....	59
8. KAWASAN KEPITING.....	60
9. ONE DAY ONE EGG.....	60
10. PERIAS.....	61
11. KOMUNITAS SIGAP STUNTING.....	61

12. RAMAI CERITA.....	61
13. YANDU CATIN.....	62
14. REMATRI SI DARA MANIS.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
LAMPIRAN.....	64
A. Surat Keputusan Walikota Dumai No, 440/378/2022 Tentang Kelurahan Prioritas PENCEPATAN Penurunan Stunting.....	64
B. Surat Keputusan Walikota Dumai No, 443/005.2/2023 Tentang Perubahan Pembentukan Tim PENCEPATAN Penurunan Stunting.....	66
C. Lampiran Capaian Indikator Tim Percepatan Penurunan Stunting Semester II Kota Dumai tahun 2023 Perilaku.....	75
D. Agenda Kerja Sekretariat TPPS Kota Dumai Tahun 2023.....	89

Daftar Tabel

Tabel 1	Luas Wilayah Kota Dumai berdasarkan Kecamatan (km2)	7
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kota Dumai berdasarkan Kecamatan	7
Tabel 3	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022	8
Tabel 4	Jumlah Balita <i>Stunting</i> Kota Dumai Tahun 2023 (entry e-PPGBM)	11
Tabel 5	Program dan Kegiatan terkait Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kota Dumai Tahun 2023.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1	Pilar Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	2
Gambar 2	Peta Administratif Kota Dumai.....	6
Gambar 3	Situasi Gizi Kota Dumai Tahun 2023	9
Gambar 4	Dokumentasi Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kepada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang.....	13
Gambar 5	Dokumentasi Kegiatan Operasi Timbang.....	16
Gambar 6	Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah Ibu Hamil dan Neonatal	22
Gambar 7	Dokumentasi Kegiatan Kementerian Agama Kota Dumai.....	23
Gambar 8	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus <i>Stunting</i>	25
Gambar 9	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Politeknik Harapan Bersama Dumai	26
Gambar 10	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dapur Sehat.....	27
Gambar 11	Dokumentasi Liputan/ Publikasi <i>Stunting</i>	31
Gambar 12	Foto Akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai	33
Gambar 13	Piagam Penghargaan Penilaian Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan.....	35
Gambar 14	Piagam Penghargaan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	35
Gambar 15	Beberapa Dokumentasi Kampanye, Edukasi, dan informasi terkait <i>Stunting</i> di Tahun 2023.....	36
Gambar 16	Review Penilaian Kinerja Penanganan <i>Stunting</i> TPPS Kota Dumai di Tahun 2023.....	37
Gambar 17	Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Pangan Bagi Keluarga <i>Stunting</i>	39
Gambar 18	Kegiatan Kelompok Wanita Tani 7	40
Gambar 19	Kegiatan Pelatihan Budikdamber	41
Gambar 20	Pemberian Telur pada Inovasi Gelang Anting Sejuler	55
Gambar 21	Kegiatan Forum Pelita Beranting.....	57
Gambar 22	Gambar Buku Resep PMT Lokal.....	57
Gambar 23	Kegiatan Gazebo Infaq <i>Stunting</i>	58
Gambar 24	Kegiatan Launching Aplikasi Si Kompang Merdu	59

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Prevalensi <i>Stunting</i> Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2022.....	8
Grafik 2	Perkembangan Prevalensi <i>Stunting</i> Kota Dumai Berdasar ePPGBM Tahun 2022 – 2023.....	9
Grafik 3	Perkembangan AKI, AKB, dan AKABa Kota Dumai Tahun 2017-2022.	10
Grafik 4	Prevalensi Balita <i>Stunting</i> Tahun 2022 s.d Desember 2023.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (sumber : Perpres 72 tahun 2021). Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. Penurunan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. *Stunting* mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak *stunting* berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.

Melihat begitu krusialnya dampak *stunting* bagi pembangunan sosial ekonomi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin telah menetapkan penanggulangan *stunting* sebagai salah satu proyek prioritas strategis (*major project*) nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, dengan target Menurunnya angka kematian luhingga 183 per 100.000 kelahiran hidup serta menurunnya prevalensi *stunting* hingga **14%**. Penurunan *stunting* penting dilakukan dengan **pendekatan multi-sektor** melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Selaras dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Dumai juga telah memasukkan kebijakan penanggulangan *stunting* sebagai salah satu target pembangunan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2019-2024 dengan target menurunkan prevalensi *stunting* menjadi **10%** di tahun 2024 (dengan menggunakan sumber data hasil *entry* e-PPGBM).

Merujuk pada Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) 2018-2024, terdapat Lima pilar utama pencegahan *stunting*, yaitu (i) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (ii) Kampanye Perubahan Perilaku dan Komunikasi antar pribadi; (iii) Konvergensi Program Nasional, Daerah dan Desa/

Kelurahan; (iv) Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (v) Pemantauan dan Evaluasi. Stranas *Stunting* diformulasikan sebagai strategi jangka menengah-terintegrasi yang mengedepankan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Hal ini bertujuan agar seluruh intervensi pencegahan, baik spesifik maupun sensitif lebih maksimal, mengingat pencegahan *stunting* membutuhkan upaya serius dan terintegrasi pada semua bidang.

Gambar 1 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting



Sumber: Stranas *Stunting* 2018-2024

Tujuan strategi nasional penurunan stunting pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) menurunkan prevalensi stunting, (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; (e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dengan menyoasar kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 - 59 bulan.

Stranas *Stunting* juga menetapkan tiga prioritas, yaitu (1) sasaran prioritas; (2) intervensi prioritas; dan (3) lokasi prioritas. Sasaran prioritas dari pencegahan *stunting* adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sementara itu, intervensi prioritas dibagi menjadi dua kelompok yaitu intervensi spesifik; yang menyoasar penyebab langsung terjadinya *stunting*, dan intervensi sensitif yang menyoasar penyebab tidak langsung. Intervensi prioritas ini juga diidentifikasi untuk setiap kelompok sasaran prioritas yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk lokasi prioritas, Pemerintah menetapkan bahwa percepatan pencegahan *stunting* akan dilakukan di seluruh kabupaten/ kota secara bertahap yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui aksi yang terintegrasi. Aksi Integrasi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama sehingga institusi penanggung jawab Aksi Integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Tim yang sudah ditunjuk oleh Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh Aksi Integrasi yang diperlukan untuk memastikan intervensi lintas sektor untuk penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Aksi Integrasi ini dilaksanakan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan di kabupaten/kota untuk memastikan:

- a. Perencanaan kegiatan penurunan stunting dilakukan dengan berbasis data;
- b. Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh daerah dapat dipastikan alokasinya pada dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas intervensi;
- d. Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil-hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui **8 (delapan) aksi**, yaitu:

1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting
2. Penyusunan Rencana Kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa/Kelurahan
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
6. Sistem Manajemen Data Stunting
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

8. Reviu Kinerja Tahunan

8 (delapan) Aksi Integrasi harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan intervensi penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen ini menyajikan **Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2023** untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang capaian pelaksanaan program percepatan pencegahan *stunting* melalui aksi konvergensi stunting di Kota Dumai. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang tantangan dalam pelaksanaan program sehingga dapat menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan program ke depan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi stunting adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65783);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah

dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. PENGORGANISASIAN

Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan bukan tanggung jawab salah satu institusi saja. Untuk itu, diperlukan sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksana Aksi Integrasi. Keanggotaan tim lintas sektor tersebut sekurang-kurangnya mencakup instansi yang menangani: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan intervensi penurunan stunting dikoordinasikan oleh **Tim Percepatan Penurunan Stunting** Kota Dumai. Tim tersebut selanjutnya bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting terintegrasi.

Tim Percepatan Penurunan Stunting terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
4. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
5. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
6. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management.

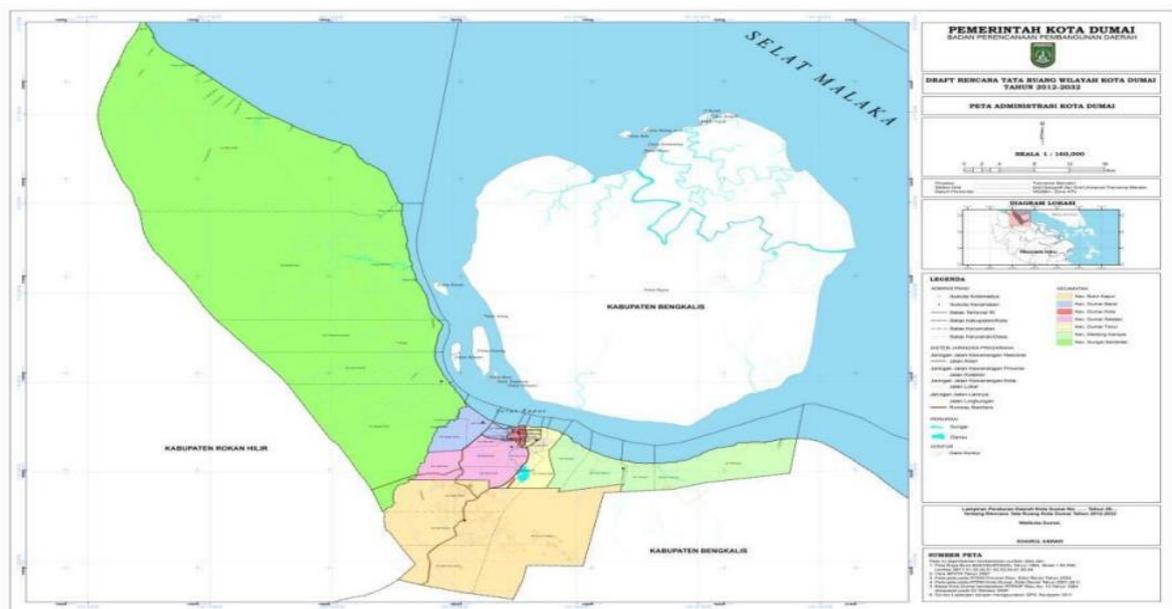
BAB 2

CAPAIAN UMUM KINERJA PENCEGAHANDAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA DUMAI

2.1. GAMBARAN UMUM KOTA DUMAI

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101o23'37" -101o28'13" Bujur Timur dan 1o23'00" - 1o24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 206.673,36 Ha. Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.

Gambar 2 Peta Administratif Kota Dumai



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2022

Luas wilayah Kota Dumai mulai tahun 2023 adalah 2066,75 km². Kota ini terbagi menjadi 7 Kecamatan dengan 36 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Sungai Sembilan yaitu sebesar 1420,92 km² atau sekitar 68,75 persen dari luas wilayah Kota Dumai. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Dumai Kota 5,29 km² atau sekitar 0,26 persen. Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Dumai berdasarkan Kecamatan (km²)

Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (KM²)	Persentase
Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75
Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72
Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,29	16,42
Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1420,92	68,75
Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91
Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26
Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,2
Total		2066,75	100

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 146.735 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 144.253 jiwa, dengan laju pertumbuhan per tahun 2020-2022 sebesar 2,71%, dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 105 dengan kata lain setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. Rasio jenis kelamin di masing-masing kecamatan memiliki kondisi yang berbeda. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Dumai Timur, yaitu sebanyak 72.106 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebanyak 18.512 jiwa.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Dumai berdasarkan Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk PerKecamatan
Dumai Barat	46.198
Dumai Timur	72.106
Bukit Kapur	54.734
Sungai Sembilan	45.298
Medang Kampai	18.512
Dumai Kota	40.708
Dumai Selatan	54.276
Total	331.832

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat yakni sebesar 161 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu 7.696 jiwa/km², sedangkan terendah berada di Kecamatan Dumai Barat yaitu 4.617,25 jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

Nama Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Dumai Barat	13,92	1278
Dumai Timur	21,73	2030
Bukit Kapur	16,49	161
Sungai Sembilan	13,65	32
Medang Kampai	5,58	113
Dumai Kota	12,27	7.695
Dumai Selatan	16,36	821
Total	100	12130

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2023

2.2. PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Kondisi prevalensi *stunting* di Kota Dumai telah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1 Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Dumai dan Provinsi Riau

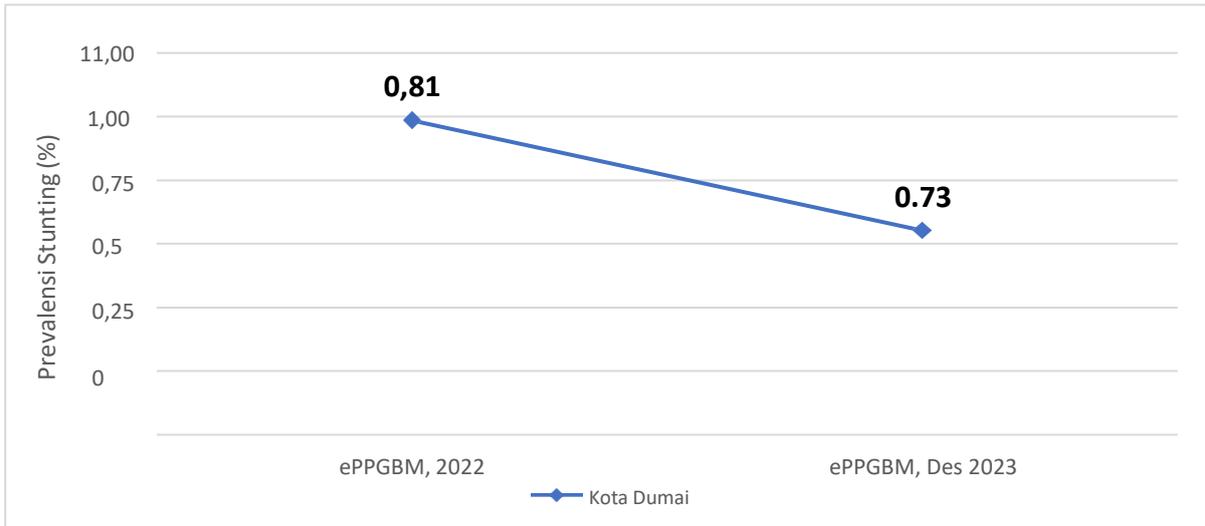


Sumber: SSGI 2021, SSGI 2022

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan angka prevalensi

Kota Dumai dan Provinsi Riau pada kurun tahun 2021 – 2022, dimana angka prevalensi stunting Kota Dumai berhasil diturunkan dari 23 di tahun 2021 menjadi 12,8% di tahun 2022. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau yang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,30% di tahun 2021 menjadi 17% di tahun 2022.

Grafik 2 Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Dumai Berdasarkan ePPGBM Tahun 2022 - 2023



Sumber: ePPGBM 2022, ePPGBM Desember 2023

Pelaporan data melalui aplikasi e-PPGBM juga menunjukkan penurunan prevalensi stunting Kota Dumai dari tahun 2022 sebesar 0,81% menjadi 0,73% pada Desemberpi 2023. Untuk itu perlu menjadi catatan dan evaluasi bersama bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prevalensi stunting yang bersumber dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022) dengan pelaporan data melalui aplikasi e-PPGBM Kementerian Kesehatan Indonesia.

Pada level *intermediate outcome*, capaian kondisi status gizi di Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3 Situasi Gizi Kota Dumai Tahun 2023

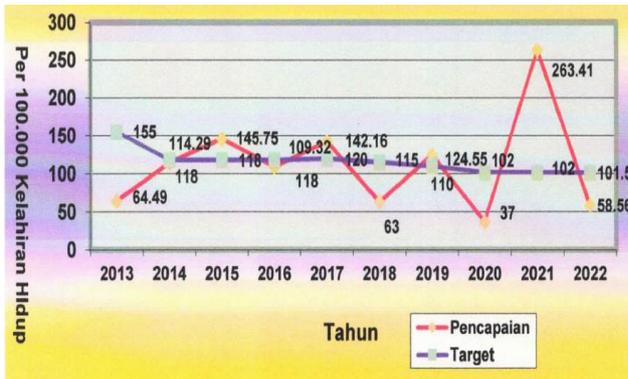


Adapun perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi

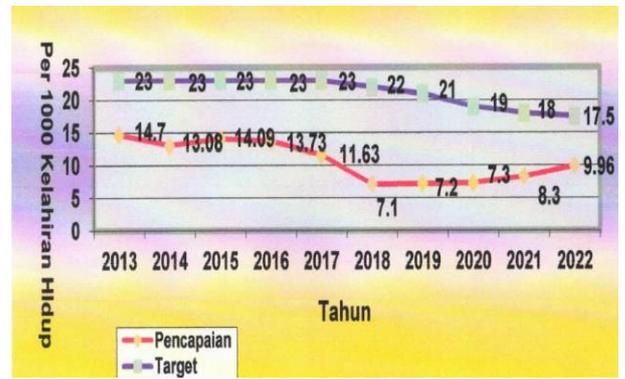
(AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABa) di Kota Dumai tersaji pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3 Perkembangan AKI, AKB, dan AKABa Kota Dumai Tahun 2013-2022

Angka Kematian Ibu (AKI)



Angka Kematian Bayi (AKB)



Angka Kematian Bayi (AKBa)



Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Kota Dumai Tahun 2022

2.3. HASIL ANALISIS SITUASI STUNTING TAHUN 2023

Analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting di wilayah, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan di Kota Dumai. Analisis Situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 HPK. Berdasarkan data timbang ukur per Desember Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Data timbang ukur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Oktober Tahun 2023, diperoleh data sebaran stunting Kota Dumai, sebagai berikut:

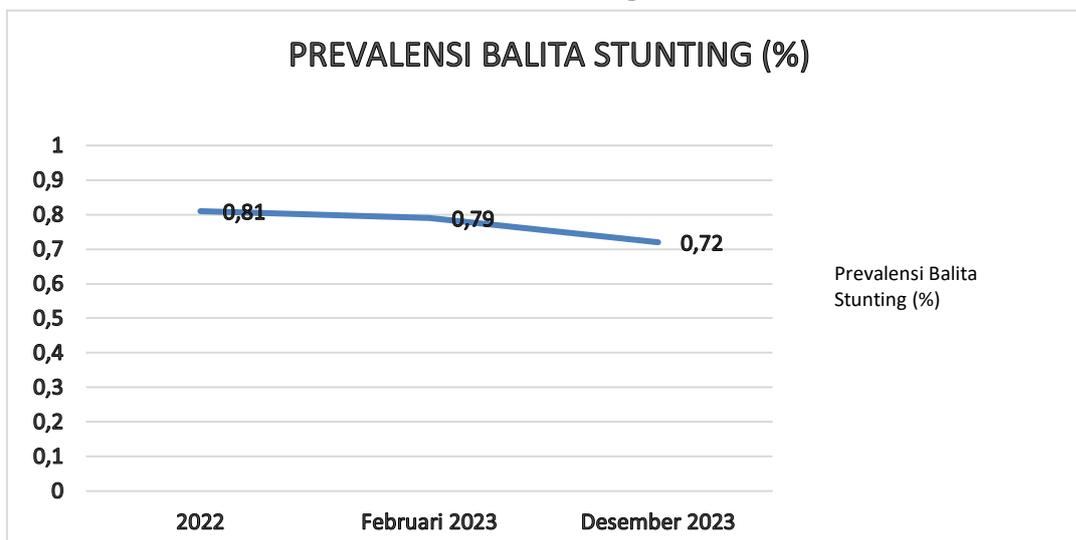
Tabel 4 Jumlah Balita Stunting Kota Dumai Desember Tahun 2023 (entry e-PPGBM)

NO	KELURAHANA	SASARAN BALITA 0 - 59 BULAN	BALITA YANG DIUKUR	TB/U		JUMLAH BALITA STUNTING	%
				SANGAT PENDEK	PENDEK		
1	BUKIT NENAS	666	666	1	1	2	0,3003
2	BAGAN BESAR	671	671	1	2	3	0,447
3	BAGAN BESAR TIMUR	684	684	0	0	0	0
4	BUKIT KAYU KAPUR	545	545	2	0	2	0,55
5	KAMPUNG BARU	613	613	4	0	4	0,816
6	GURUN PANJANG	532	532	4	2	6	0,94
7	BUKIT KAPUR	760	760	6	1	7	0,921
8	PELINTUNG	426	426	1	1	2	0,235
9	GUNTUNG	249	249	3	0	3	1,205
10	TELUK MAKMUR	418	418	4	0	4	0,957
11	MUNDAM	419	419	2	0	2	0,477
12	BANGSAL ACEH	472	472	0	1	1	0,212
13	LUBUK GAUNG	1010	1010	3	0	3	0,297
14	BASILAM BARU	395	395	8	1	9	2,025
15	BATU TERITIP	385	385	0	1	1	0,26
16	TANJUNG PENYEMBAL	467	467	4	2	6	0,642
17	SUNGAI GENIOT	527	527	2	0	2	0,19
18	PANGKALAN SESAI	716	716	7	7	14	1,257
19	SIMPANG TETAP DARUL IHSAN	651	651	3	6	9	1,229
20	PURNAMA	1279	1279	14	22	36	3,44
21	BAGAN KELADI	530	530	6	8	14	3,396
22	MEKAR SARI	731	731	1	2	3	0,41
23	BUKIT TIMAH	459	459	1	0	1	0,218
24	BUMI AYU	767	767	3	4	7	1,565
25	BUKIT DATUK	846	846	3	2	5	0,473
26	RATU SIMA	1037	1037	1	3	4	0,482
27	TANJUNG PALAS	718	718	1	3	4	0,418
28	JAYA MUKTI	936	936	1	6	7	0,962
29	TELUK BINJAI	1077	1077	2	1	3	0,186
30	BULUH KASAP	517	517	0	0	0	0
31	BUKIT BATREM	752	752	1	0	1	0,133
32	RIMBA SEKAMPUNG	867	867	0	0	0	0
33	SUKAJADI	601	601	1	0	1	0,166
34	BINTAN	412	412	0	0	0	0
35	DUMAI KOTA	385	385	1	0	1	0,519
36	LAKSAMANA	221	221	0	1	1	0,452
TOTAL		22741	22741	91	77	168	0,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Desember 2023

Pada Oktober Tahun 2023 balita yang telah diukur sejumlah 22.741 orang dari balita pada usia 0-59 Bulan. Hasil timbang ukur pada Oktober Tahun 2023 tersebut didapat data balita dengan status pendek dan sangat pendek sejumlah 176 orang atau sekitar 0,72% dari total jumlah balita yang diukur.

Grafik 4 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2022 s.d Desember 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Desember 2023

Prevalensi balita stunting di Kota Dumai pada awal Tahun 2023 mengalami penurunan dari 0,82% di akhir Tahun 2022 menjadi 0,73% pada Desember 2023. Untuk jumlah balita stunting mengalami penurunan dari 185 balita (0,81%) pada akhir Tahun 2022 menjadi 176 balita (0,72%) pada Desember 2023. Pada bulan Desember 2023 dilakukan penimbangan serentak dengan hasil penurunan prevalensi balita stunting menjadi 0,73% dengan jumlah balita stunting sebanyak 176 balita dari 22.741 balita yang diukur.

Adapun kondisi capaian upaya penurunan stunting di Kota Dumai berdasarkan layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2023, disajikan sebagai berikut:

A. Kondisi Capaian Layanan Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Adapun capaian indikator intervensi spesifik dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2023 sebagai berikut:

1) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita Kurus

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK). Identifikasi dilakukan dengan cara mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA) dan dinyatakan berisiko apabila LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu yang mengalami KEK berisiko untuk melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil KEK diberikan Makanan Tambahan Ibu Hamil. Sementara itu, PMT Balita diberikan pada balita

kurus usia 6-59 bulan yang indikator Berat Badan (BB) menurut Panjang Badan (PB)/Tinggi Badan (TB) kurang dari minus 2 standar deviasi ($< - 2 SD$) yang tidak rawat inap dan tidak rawat jalan.

Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kepada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurus



Jumlah ibu hamil yang diukur pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai sebanyak 8.112 orang dengan jumlah ibu hamil KEK sebanyak 313 orang atau sekitar 100%. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai berupaya untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil KEK dengan

melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 313 ibu hamil KEK yang telah teridentifikasi. Hal tersebut berarti pemberian PMT kepada ibu hamil KEK pada semester II Tahun 2023 telah mencapai 100%.

Sedangkan persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi baru mencapai 100% dari perbandingan 212 anak usia 6-59 bulan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi dibanding dengan 212 anak usia 6-59 bulan.

2) Tablet Tambah Darah bagi Remaja, WUS, dan Ibu Hamil

Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Remaja yang menderita anemia berisiko tinggi untuk mengalami anemia pada masa kehamilannya. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan janin serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, remaja dan wanita usia subur (WUS) perlu meminum Tablet Tambah Darah (TTD) sebanyak satu kali dalam seminggu. Sementara, ibu hamil mengkonsumsi TTD sebanyak 90 tablet atau lebih selama masa kehamilannya untuk mencegah anemia saat hamil.

Pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai terdapat sebanyak 9590 ibu hamil. Capaian pemberian 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai di semester II Tahun 2023 mencapai 74% atau sebanyak 7110 ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan.

Sedangkan jumlah remaja putri pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai sebanyak 15.119 orang dengan capaian pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai pada semester I Tahun 2023 mencapai 88% atau sebanyak 13.315 remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).

3) Promosi dan Konseling Menyusui

Untuk mencegah stunting, terdapat standar ideal (golden standard) yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu: (1) pemberian ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan; (2) pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan; dan (3) lanjutan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Pemberian ASI eksklusif (bayi diberikan ASI saja tanpa tambahan apapun) pada bayi usia 0-6 bulan sangat penting tidak saja untuk meningkatkan status gizi tetapi juga untuk kelangsungan

hidup (survival) bayi. Untuk itu, diperlukan promosi dan edukasi untuk memberikan ASI eksklusif melalui berbagai cara baik pertemuan langsung (konseling menyusui oleh tenaga kesehatan terlatih) maupun promosi di media massa cetak dan elektronik. Pemberian ASI Eksklusif diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012.

Berdasar data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di Kota Dumai baru mencapai 63% di semester I Tahun 2023. Artinya baru sebanyak 4.359 baduta 0-6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dari total 2423 baduta 0-6 bulan.

4) Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

Setelah pemberian ASI secara eksklusif selama usia 0-6 bulan, selanjutnya bayi mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MP-ASI adalah kuantitas dan kualitasnya memenuhi prinsip gizi seimbang agar tidak cenderung tinggi karbohidrat tetapi juga memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. MP-ASI ada yang bersifat pabrikan dan ada yang berbasis pangan lokal.

Keduanya dapat diberikan, namun MP-ASI berbasis pangan lokal akan lebih berkelanjutan karena memanfaatkan pangan yang ada di masyarakat.

Berdasar data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah baduta usia 6-23 bulan di Kota Dumai pada semester II Tahun 2023 sebanyak 3.937 anak. Namun jumlah baduta usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI baru sebanyak 3.715 anak dengan capaian 94%.

5) Tata Laksana Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk perlu ditangani segera dengan intervensi pemulihan yang dapat dilakukan dengan metode pendekatan individual maupun

pendekatan masyarakat. Secara umum, balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta cukup ditangani dengan pemberian makanan tambahan untuk mengejar pertumbuhannya. Sementara, pada balita gizi buruk yang memiliki penyakit penyerta harus dilakukan pengobatan penyakitnya terlebih dahulu untuk selanjutnya diberikan makanan tambahan.

Jumlah balita usia 0-59 gizi buruk pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai sebanyak 13 anak. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan tata laksana gizi buruk kepada 13 anak tersebut.

6) Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan

Kegiatan pemantauan pertumbuhan dilakukan sejak anak berusia 0-72 bulan dengan penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan pemantauan dilakukan di fasilitas kesehatan dasar hingga taman kanak-kanak. Pencatatan pemantauan dilakukan di Kartu Menuju Sehat (KMS). Jika berat badan anak di bawah garis merah, artinya anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat.

Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Operasi Timbang



Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah balita usia 0-59 bulan pada semester II Tahun 2023 di Kota Dumai sebanyak 44.931 anak dengan persentase yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya baru mencapai

78% atau sekitar 35.003 anak balita usia 0-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.

7) Suplementasi Mikronutrien

Suplementasi mikronutrien terdiri dari suplementasi kalsium untuk ibu hamil serta suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare bagi anak usia 0-59 bulan. Vitamin A diberikan di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus. Sejak tahun 2016, pemberian vitamin A dilakukan terintegrasi dengan pemberian obat cacing dan imunisasi campak.

Taburia merupakan tambahan multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang balita usia 6-59 bulan dengan prioritas balita usia 6-24 bulan. Taburia mengandung 12 macam vitamin dan 4 jenis mineral yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang dan mencegah terjadinya anemia pada balita. Taburia diberikan kepada anak dengan menambahkannya pada sarapan pagi yang disiapkan di rumah.

8) Pemeriksaan Kehamilan dan Imunisasi

Pemeriksaan kehamilan (*Antenatal care*) dilakukan selama minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu dua kali pada trimester 1, dua kali pada trimester 2 dan dua kali pada trimester 3. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dandicatat di buku KIA. Selain itu, ibu hamil juga harus mendapatkan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) untuk menghindari tetanus neonatorium. Pada saat pemeriksaan kehamilan pertama, ibu hamil akan ditanyai mengenai status imunisasi tetanusnya. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 agar memiliki perlindungan terhadap infeksi tetanus.

9) Manajemen Terpadu Balita Sakit

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah pendekatan pelayanan terintegrasi dalam tata laksana balita sakit yang berfokus pada kesehatan anak usia 0-59 bulan secara menyeluruh di layanan rawat jalan fasilitas kesehatan dasar. Pelayanan MTBS dilakukan oleh perawat atau bidan dengan supervisi dokter yang terlatih. Pada daerah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, tenaga nonkesehatan diperbolehkan melakukan pelayanan kuratif terbatas dengan pendekatan MTBS berbasis masyarakat (MTBS-M).

Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Dumai, persentase anak berusia di

bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap mencapai 84% dari perbandingan 8.718 balita yang mendapat imunisasi dasar dibanding dengan 7.335 anak usia 0-11 bulan dalam periode semester II Tahun 2023 di Kota Dumai.

B. Kondisi Capaian Layanan Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Dinas Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

1) Air Minum dan Sanitasi

Pada anak yang diare atau cacingan, zat gizi dari makanan yang dikonsumsi tidak diserap oleh tubuh. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tubuh memecah cadangan makanan untuk melawan infeksi sehingga membuat anak menjadi kurus. Infeksi berulang yang terjadi dalam waktu cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi layak, dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai telah menganggarkan kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan sebagai upaya pemenuhan akses air minum layak bagi warga masyarakat Kota Dumai serta pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat sebagai upaya pemenuhan sarana sanitasi layak bagi warga Kota Dumai. Namun realisasi kegiatan tersebut belum dapat dilaporkan dalam laporan semester I ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II Tahun 2023.

2) Pelayanan Gizi dan Kesehatan

Pelayanan Gizi dan Kesehatan mencakup pelayanan Keluarga Berencana (KB), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pelayanan kesehatan dalam Keluarga Berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas melalui upaya promotif, preventif, pelayanan, dan pemulihan termasuk perlindungan efek samping, komplikasi, dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi, serta pelayanan infertilitas. Melalui KB, masyarakat jadi bisa mengatur jarak kehamilannya sehingga lebih mudah untuk memastikan kecukupan gizi anak.

Berdasar data dari DPPKB Kota Dumai, jumlah persalinan pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai sebanyak 2.598 orang namun baru sekitar 1.876 orang yang terdaftar menjadi peserta KB pasca persalinan atau persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) baru mencapai 72,2% pada semester II Tahun 2023 ini.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan mulai tahun 2014 ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan finansial. Bagi penduduk miskin dan hampir miskin, pemerintah memberikan bantuan iuran agar seluruh masyarakat tercakup dalam layanan JKN. Dengan adanya jaminan kesehatan, ibu hamil maupun bayi dan balita dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas secara tepat waktu, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi serta pengobatan penyakit atau infeksi. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam upaya penurunan stunting melalui peningkatan status kesehatan ibu dan balita.

Berdasar data dari Dinas Sosial Kota Dumai, jumlah keluarga miskin dan tidak mampu (Desil 1-4) dengan iuran JKN dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah pada semester II Tahun 2023 sejumlah 144.456 keluarga.

Selanjutnya adalah Program Keluarga Harapan merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan ibu hamil, anak balita dan anak usia sekolah. Keluarga yang mendapat PKH akan memperoleh uang tunai apabila melaksanakan beberapa persyaratan, antara lain ibu hamil datang melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali, anak balita datang ke posyandu setiap bulan, dan anak sekolah hadir di fasilitas pendidikan. PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dalam jangka

pendek dan mengatasi kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang. Keluarga penerima manfaat PKH juga akan didampingi agar pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai kesehatan dan gizi dapat meningkat sehingga uang tunai yang diperoleh dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas asupan gizi ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah.

Berdasar data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Dumai, jumlah Keluarga miskin memperoleh bantuan tunai melalui PKH (Program Keluarga Harapan) pada semester II Tahun 2023 sejumlah 6.935 keluarga.

Layanan kesehatan juga diberikan kepada calon pengantin. Pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai terdapat 1854 calon pengantin yang keseluruhannya telah mendapat pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanannikah atau dengan capaian 100%.

3) Edukasi, Konseling, dan Perubahan Perilaku

Edukasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tatap muka tetapi juga dapat berupa penyebaran informasi melalui media. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai bekerja sama untuk membuat kampanye dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat.

Berdasarkan data dari DPPKB Kota Dumai, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di 36 kelurahan di Kota Dumai telah melaksanakan perubahan perilaku yang dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang merupakan bagian penting dari intervensi sensitif untuk menurunkan stunting. Beberapa kegiatan terkait upaya perubahan perilaku antara lain penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini, penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan gizi dan kesehatan, penyuluhan gemar bercocok tanam, dan penyuluhan gemar makan ikan. Kegiatan KIE dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui media massa cetak dan elektronik, kegiatan pendidikan, pertemuan langsung, dan juga melalui seni budaya.

Edukasi, konseling, dan perubahan perilaku juga dilaksanakan melalui kegiatan pola asuh (parenting) yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam menerapkan pengasuhan yang tepat pada anak, termasuk di dalamnya perbaikan pola asuh untuk mencegah stunting. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai metode, dalam bentuk pelatihan pada kegiatan di

Posyandu maupun pada kegiatan di PAUD dan BKB.

Berdasar data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, sejumlah 111 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdaftar, secara keseluruhan telah mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).

Pola asuh berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dalam pemberian makanan, orang tua perlu membiasakan anak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan serta menghindari makanan yang manis, asin, dan berlemak. Kebiasaan memandikan anak, mengajari anak buang air besar pada tempatnya, perilaku cuci tangan, dan hal-hal lainnya juga akan membantu membiasakan anak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai juga melaksanakan beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi stunting bersama guru PAUD di masyarakat/kelurahan yang diikuti oleh dinas dan pokja bunda PAUD di masyarakat serta publikasi dan sosialisasi PAUD (Pubsos PAUD) yang diikuti oleh masyarakat di kelurahan.

Konseling kesehatan juga diberikan kepada kelompok remaja. Para remaja diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab berkaitan dengan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualnya. Tujuannya untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular seksual dan penyakit lainnya. Apabila kehamilan tidak direncanakan dengan baik atau hamil pada usia yang terlalu muda, maka hal ini akan memperbesar risiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Pada kurun waktu Januari s.d Desember 2023 di Kota Dumai terdapat 1.053 ibu hamil dan diantaranya terdapat 11,02% kehamilan yang tidak diinginkan atau sekitar 116 kehamilan.

Di Kota Dumai juga terdapat Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR). PIK dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebanyak 25 dari 25 jumlah PIK dan BKR yang terdapat di Kota Dumai atau sekitar 100% persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja di semester II Tahun 2023

Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Rumah Ibu Hamil dan Neonatal



Edukasi, konseling, dan perubahan perilaku juga diberikan kepada keluarga beresiko stunting melalui pendampingan. Jumlah keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan sejumlah 10.284 keluarga dari total jumlah keluarga beresiko stunting sebanyak 12.855 atau baru mencapai 80% pada kurun waktu semester II Tahun 2023 ini. Sedangkan jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan konseling dari tim TPK pada semester II Tahun 2023 sejumlah 10.284 keluarga dari total 12.855 keluarga atau baru mencapai 94%. Dan sejumlah 34 kelurahan di Kota Dumai telah melaksanakan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Kementerian Agama Kota Dumai



Kantor Kementerian Agama Kota Dumai juga berperan aktif dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dengan salah satu materi tentang *stunting* di 7 kecamatan di Kota Dumai, bimbingan pra nikah bagi remaja usia nikah, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah dengan salah satu materi mencakup *stunting*, serta penandatanganan MoU antara Kemenag dengan DPPKB tentang penurunan *stunting*.

4) Akses Pangan Bergizi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan menyediakan makanan yang lebih bergizi dengan menyediakan beras dan telur untuk keluarga miskin. BPNT merupakan transformasi dari penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Penyaluran secara non tunai diharapkan dapat meningkatkan transparansi program serta memberikan

kebebasan bagi masyarakat untuk menggunakan bantuan tersebut secara bijak sesuai kebutuhannya. Kartu elektronik dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko. Melalui BPNT, masyarakat dapat memperoleh

nutrisi yang lebih seimbang karena tidak hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat melalui beras, tetapi juga bahan pangan lainnya seperti telur yang tinggi protein. Oleh karena itu, kehadiran BPNT bagi keluarga pra sejahtera sangat penting untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BPNT sebanyak 2.774 dari 6.935 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau sekitar 40%.

Sedangkan jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan pada semester II Tahun 2023 sebanyak 6.935 keluarga.

C. Kondisi Capaian Indikator RAN PASTI

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia atau RAN PASTI menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. RAN PASTI merupakan upaya pemerintah pusat mengkonsolidasikan atau mengkonvergensi kegiatan- kegiatan, program dan anggaran yang termasuk di dalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan serta sektor swasta. Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan RAN PASTI yaitu :

1) Pendekatan keluarga beresiko *stunting*

Pendekatan keluarga beresiko *stunting* dilakukan dengan intervensi hulu yaitu pencegahan lahirnya bayi *stunted* dan penanganan balita *stunting*. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai per bulan Desember Tahun 2023 terdapat 12.855 keluarga beresiko *stunting*. Pemerintah Kota Dumai telah membentuk 144 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan tujuan untuk mendeteksi kasus *stunting* yang tersebar di 36 Kelurahan se-Kota Dumai.

Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta surveilans kepada sasaran keluarga beresiko *stunting*. TPK juga dibantu oleh pihak lain seperti penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Kelurahan, dan Pemerintah Kota. Untuk mendukung kinerja TPK dalam rangka percepatan pencegahan dan

penurunan angka stunting, Pemko Dumai melalui DPPKB Kota Dumai melaksanakan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga. Orientasi TPK ditujukan bagi 432 TPK yang terdiri dari unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM) dan Bidan.

Dalam periode Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 3.431 ibu hamil mendapat pendampingan. Pendampingan juga diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk. Sejumlah 4 keluarga telah diberikan tata laksana gizi buruk.

Selain pembentukan TPK, DPPKB juga bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dalam hal screening dan sosialisasi dalam upaya pencegahan stunting kepada calon pengantin.

Gambar 8 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus Stunting



Sumber : DPPKB Kota Dumai

Dari hasil kasus *stunting* yang ditemukan, dilaksanakan juga kegiatan audit *stunting*. Pelaksanaan audit kasus *stunting* dijadwalkan sebanyak dua kali dalam setahun. Sampai dengan bulan Desember 2023 telah dilaksanakan dua kali audit *stunting* oleh DPPKB beserta tim terkait.

2) Pendekatan multi sektor dan multi pihak melalui penta helix

Penurunan angka prevalensi *stunting* nasional memerlukan keterlibatan aktif multi sektor dalam kegiatannya. Konvergensi merupakan pendekatan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan program dari pusat hingga kelurahan. Elemen-elemen yang berada di dalamnya saling mendukung satu sama lain sehingga target-target nasional dan daerah dapat lebih efektif tercapai. Konsep penta helix mengandung pengertian yang hampir sama dengan konvergensi. Dimana konsep pembangunan *penta helix* melibatkan lima elemen yakni unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media dalam pembangunan nasional. Masalah *stunting* yang merupakan prioritas nasional juga memerlukan keterlibatan elemen-elemen tersebut dalam upaya penurunan prevalensi nasional.

Gambar 9 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Universitas Riau



Sumber : DPPKB Kota Dumai

Kota Dumai telah menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi. Politeknik Harapan Bersama Kota Dumai merupakan salah satu unsur akademisi yang terlibat aktif melalui program

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memberikan peran serta dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya berupa penyuluhan terkait stunting. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kesehatan, memupuk kebiasaan hidup sehat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan melaksanakan prinsip hidup sehat. Juga Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting yang meliputi penyusunan menu, pengadaan makanan dan pengolahan makanan.

Gambar 10 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dapur Sehat



Sumber : DPPKB Kota Dumai

Terdapat 10 (sepuluh) kelurahan di Kota Dumai yang menjadi lokasi prioritas penurunan *stunting* Tahun 2023 yaitu Kelurahan Purnama, Bagan Keladi, Teluk Binjai, Jaya Mukti, Bagan Besar, Bukit Kayu Kapur, Teluk Makmur, Guntung, Basilam baru. Dari kelurahan tersebut beberapa diantaranya telah melaksanakan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) seperti Kelurahan Bukit Timah,

Laksamana, Buluh Kasap, Kampung Baru dan Simpang Tetap Darul Ihsan. Bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, dapur sehat ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumberdaya lokal termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.

Dari data jumlah keluarga beresiko stunting yang memiliki jamban sehat di Kota Dumai sebanyak 981 dari 12855 keluarga beresiko stunting atau sekitar 7,6%. Dan jumlah keluarga beresiko stunting yang mengakses air minum layak sebanyak 3.780 dari 12855 keluarga beresiko stunting atau sekitar 29,4%. Hal tersebut menandakan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pada keluarga beresiko stunting dalam hal sanitasi dan akses air minum layak yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak langsung stunting di luar persoalan kesehatan (40% faktor lingkungan sanitasi dan air minum dapat mempengaruhi terjadinya stunting).. Penyediaan sarana prasarana sanitasi, air minum layak, dan rumah layak huni nantinya akan dilaksanakan melalui kegiatan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dengan sasaran keluarga miskin.

3) Pendekatan intervensi gizi terpadu

Penanggulangan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program masing-masing perangkat daerah di Kota Dumai. Upaya pencegahan *stunting* dilaksanakan dari mulai pendataan calon pengantin. Jumlah calon pengantin di Kota Dumai dalam periode Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 1854 calon pengantin yang tercatat di Kementerian Kota Dumai. Calon pengantin yang telah mendaftar diberikan pendampingan tata laksana kesehatan dan gizi sebagai upaya pencegahan *stunting*. Data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, per Desember 2023 terdapat 2 calon pengantin dengan anemia. Tidak hanya melakukan pendataan tetapi Dinas Kesehatan Kota Dumai juga memberikan 90 Tablet Tambah Darah (TTD) kepada 2 calon pengantin anemia tersebut.

Dinas Kesehatan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai juga melaksanakan pendataan dan pendampingan kepada ibu hamil, namun Dinas Kesehatan Kota Dumai belum dapat mendeteksi ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) dikarenakan alat USG untuk Puskesmas hanya skrining awal dengan membaca kondisi janin yaitu letak janin, usia dan ukuran janin dan apabila ditemukan kondisi tidak normal (suspect PJT) akan di rujuk ke rumah sakit untuk ditegakkan diagnosa oleh dokter Obgyn dimana dokter Obgyn RSUD adalah bagian dari salah satu tim Pakar Tim Audit Kasus Stunting Kota Dumai.

Terdapat data jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan <2500 gram sejumlah 83 keluarga, keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang <48 cm sebanyak 83 keluarga, dan keluarga yang memiliki anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis sejumlah 82 keluarga. Dinas Kesehatan Kota Dumai juga telah memberikan tatalaksana kesehatan dan gizi dengan sasaran keluarga tersebut di atas.

Jumlah anak usia 0-23 bulan per Desember 2023 di Kota Dumai sebanyak 8.088 anak. Dari hasil pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, diperoleh data jumlah balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard sejumlah 5.868 atau mencapai 73%, jumlah balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard sebanyak 8.043 anak atau 99%. Dari 8.088 anak usia 0-23 bulan tersebut terdapat anak dengan gizi kurang sebanyak 193 anak, namun Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan telah memberikan tambahan asupan gizi kepada 193 anak tersebut sebagai upaya perbaikan gizi.

Jumlah balita 0-59 bulan sebanyak 44.931 anak. Dari total 35.003 anak tersebut, jumlah balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard sejumlah 44.931 anak dan jumlah balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard 35.003 atau %. Di Kota Dumai, capaian pemberian ASI eksklusif baru mencapai 56% atau 2.423 anak usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif dari 4.359 keluarga dengan anak usia 0-6 bulan.

BAB 3

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Stranas *Stunting* mendasarkan pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* pada lima pilar. Berikut capaian pelaksanaan Lima Pilar Stranas *Stunting*:

3.1. CAPAIAN PILAR 1 KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN

Pilar pertama bertujuan memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Pelaksanaan pilar ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu (1) nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan daerah di kota dan (2) rembuk *stunting* tahunan di tingkat kota.

Rembuk *stunting* Kota Dumai Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 19 Juni Tahun 2023. Pada pelaksanaan Rembuk *Stunting* Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kota Dumai.

Adapun berkas lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen laporan ini. Hasil liputan dan publikasi pelaksanaan Rembuk *Stunting* dapat dilihat pada gambar berikut:

A. Media Massa

Gambar 11 Dokumentasi Liputan



Kota Dumai Terima Penghargaan Penurunan Prevalensi Stunting 2023

📷 :

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/764280/kota-dumai-terima-penghargaan-penurunan-prevalensi-stunting-2023?video=>



Turunkan Angka Stunting, Pemko Dumai Terima insentif Fiskal

📷 : Turunkan Angka Stunting, Pemko Dumai Terima insentif Fiskal-Foto:Mc.Dumai

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/784829/turunkan-angka-stunting-pemko-dumai-terima-insentif-fiskal>

Daerah

Memperingati Hari Gizi Nasional Ke-63, Wali Kota Dumai Komit Turunkan Kasus Stunting

Oleh: Lisa syaiful | Editor: Revianti | 25 Jan 2023 - 19:04 | Pekanbaru



Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Dumai menggelar Acara Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) Tingkat Provinsi Riau ke-63

<https://www.rri.go.id/daerah/145563/memperingati-hari-gizi-nasional-ke-63-wali-kota-dumai-komit-turunkan-kasus-stunting>

InfoSAWIT

Minggu, 14 Januari 2024

Pencarian

Berlangganan

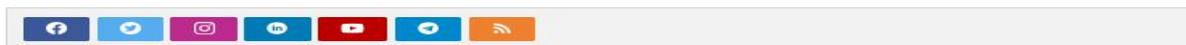
Indeks

Sustainability

Cegah Stunting, Apical Dumai Tandatangani Kesepakatan Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai

17 Februari 2023 | 20:38 WIB - 1236 Dilihat

oleh Redaksi InfoSAWIT



Dok. InfoSAWIT

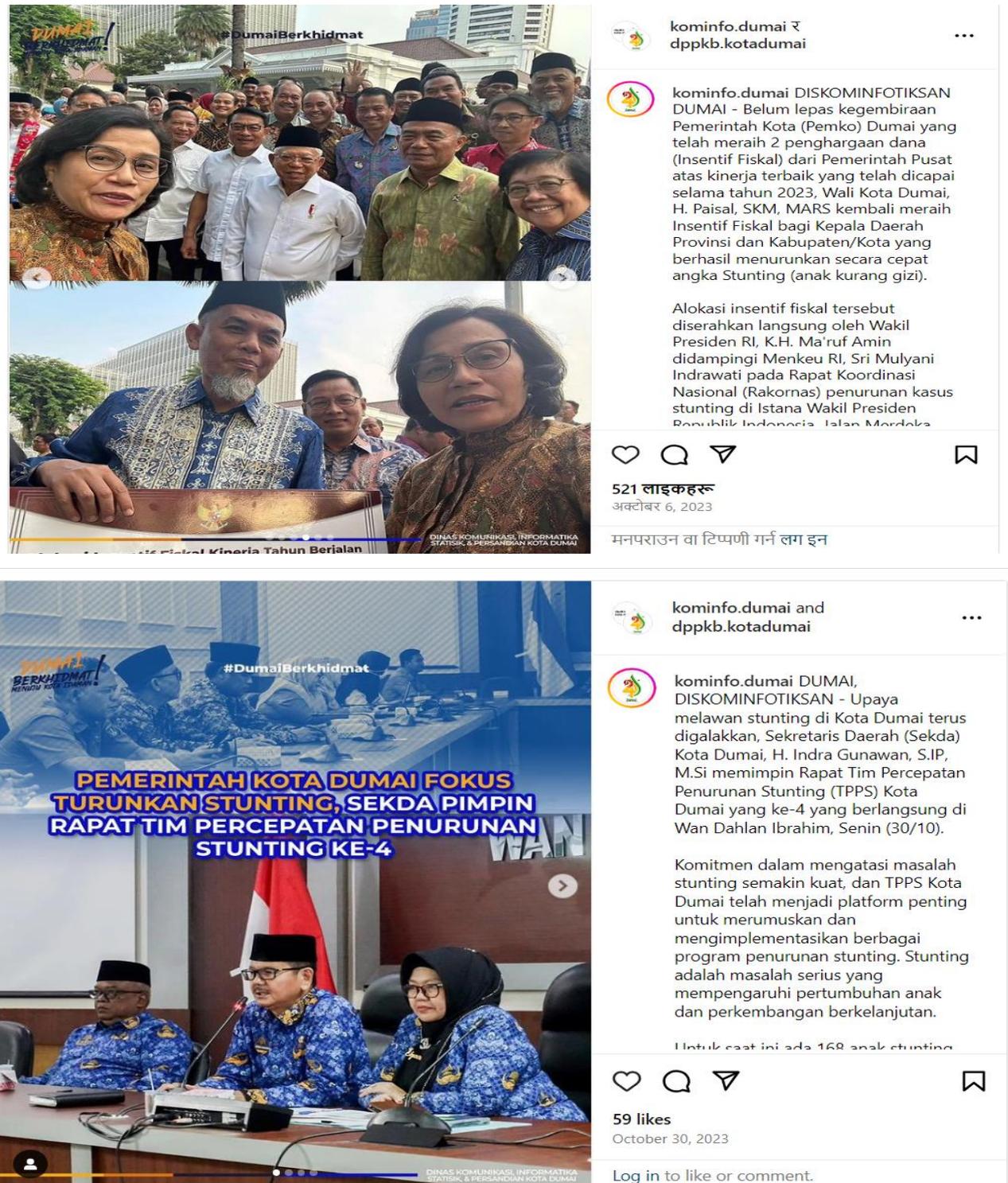


<https://www.infosawit.com/2023/02/17/cegah-stunting-apical-dumai-tandatangani-kesepakatan-bersama-dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kota-dumai/>

B. Media Sosial (*Instagram*)

Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai juga posting di Akun Resmi Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

Gambar 12 Foto Akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.





kominfo.dumai • Follow



kominfo.dumai DISKOMINFOTIKSAN, DUMAI - Pemerintah Kota Dumai kali ini melaksanakan Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen dalam Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Pelaksanaan Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen ini dilaksanakan pada Ruang Pertemuan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Bappedalitbang), Senin (19/6/2023).

Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan angka stunting. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga



36 likes

June 19, 2023

Log in to like or comment.



kominfo.dumai • Follow



kominfo.dumai DISKOMINFOTIKSAN, DUMAI - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Dumai Kota laksanakan TPK (Tim Pendampingan Keluarga) Award yang berlokasi pada Atrium Citimall Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai apresiasi terhadap kinerja serta fungsi yang ditugaskan kepada TPK se Kecamatan Dumai Kota, Selasa (12/12/2023).

Camat Dumai Kota Indra Safawi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Panitia mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah apresiasi bagi para ibu ibu yang menjalani tugas dengan baik sebagai TPK di Kelurahan se Kecamatan Dumai Kota. Indra turut mengharapakan dengan kegiatan ini,



68 likes

December 13, 2023

Log in to like or comment.

Gambar 13 Piagam Penghargaan Penilaian Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Dumai



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 14 Piagam Penghargaan Penurunan Prevalensi Stunting



3.2. CAPAIAN PILAR 2 KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Kampanye dan komunikasi perubahan perilaku dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku terkait pencegahan *stunting* yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh beberapa perangkat daerah terkait. Berikut beberapa dokumentasi kampanye/advokasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mendukung penurunan *stunting*.

Gambar 15 Beberapa Dokumentasi Kampanye, Edukasi, dan informasi terkait Stunting di Tahun 2023

Kegiatan talk show *stunting* oleh ketua TPPS kota Dumai Bapak Indra Gunawan, S.IP, M.Si dan Kadinkes bapak dr. Saipul .MKM di radio CDS FM.



Kegiatan talk show *stunting* oleh Sekretaris TPPS kota Dumai Ibu Elywarti, SKM di radio CDS FM.



3.3. CAPAIAN PILAR 3 MENDORONG KONVERGENSI PROGRAM

Pilar 3 bertujuan memperkuat konvergensi, koordinasi, serta konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat melalui kegiatan di tingkat pusat, daerah, dan desa/ kelurahan. Konvergensi di tingkat Kota Dumai dilaksanakan melalui 8 aksi integrasi percepatan pencegahan *stunting*, yaitu (1) analisis situasi; (2) penyusunan rencana kerja; (3) rembuk *stunting*; (4) pembagian kewenangan antara kelurahan dan kabupaten; (5) mobilisasi dan pembinaan KPM; (6) manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi hasil pengukuran *stunting*; dan (8) reviu kinerja.

Pada Laporan TPPS Semester I telah berjalan kegiatan (1) analisis situasi; (2) penyusunan rencana kerja; (3) rembuk *stunting*; (4) pembagian kewenangan antara kelurahan dan kabupaten; (5) mobilisasi dan pembinaan KPM. Pada laporan semester II selanjutnya dilaksanakan 6) manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi hasil pengukuran *stunting*; dan (8) reviu kinerja.

Gambar 16 Review Penilaian Kinerja Penanganan Stunting TPPS Kota Dumai di Tahun 2023



3.4. CAPAIAN PILAR 4 KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Pilar keempat ketahanan pangan dan gizi, tujuannya adalah untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Padapelaksanaannya, pilar ini diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: (1) persentase sasaran prioritas penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bantuan pangan lainnya; (2) kebijakan terkait peningkatan fortifikasi pangan; (3) akses sasaran prioritas terhadap pangan bergizi; dan (4) jumlah kawasan rumah pangan lestari. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai menjadi penanggung jawab Pilar Empat.

Terkait upaya perbaikan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi keluarga kelompok sasaran dengan melaksanakan Bantuan Sosial Pangan (BSP), Ketahanan Pangan Dan Gizi (Suplai Bahan Pangan, Pasar Murah Sembako, Program Makanan Tambahan Kolaborasi OPD terkait) serta Pelatihan BUDIKDAMBER dan Sosialiasi GEMARIKAN.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan intervensi kepada keluar beresiko Stunting melalui :

- Pemberian BSP (Bantuan Sosial Pangan) kepada keluarga Stunting
- Memberikan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pbi - jk

Untuk Bantuan Sosial Pangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan penyerahan voucher senilai Rp. 250.000,- yang akan ditukarkan berupa paket pangan bagi Anak Stunting Kota Dumai sebanyak 137 Anak yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kelayakan penerima manfaat. Penukaran dilakukan di gerai bulog jalan jend sudirman depan taman bukit gelanggang kota Dumai. Voucher tersebut akan dibagikan oleh pendamping kesejahteraan sosial (PKS) kota Dumai.

Gambar 17 Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Pangan Bagi Keluarga Stunting



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga melaksanakan kegiatan yaitu :

- Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk penurunan Stunting
- Pembuatan Poster untuk Kampanye Stunting
- Hibah kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Untuk 3 KWT (kelurahan Bukit Kapur, Bagan Keladi dan Gurun Panjang)
- Sosialisasi Menu B2SA Untuk Pencegahan Stunting
-

Gambar 18 Kegiatan Kelompok Wanita Tani



Dinas Perikanan juga melaksanakan kegiatan Intervensi Pencegahan Penurunan Stunting dalam bentuk kegiatan yaitu :

- Pelatihan Budi Daya Ikan dalam Ember (BUDIKDAMBER) Pada keluarga Stunting dengan capaian 100%
- Pemberian Bibit BUDIKDAMBER Kepada keluarga Stunting

Dalam rangkaantisipasi peningkatan angka stunting, Dinas Perikanan Kota Dumai adakan pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) bagi 100 ibu-ibu dari berbagai kelurahan yang memiliki anak kategori stunting. Tujuan kegiatan, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cara Budikdamber, guna meningkatkan pemenuhan gizi keluarga serta memotivasi dan mambantu ibu-ibu mengurangi biaya hidup rumah tangga dalam pemenuhan gizi keluarga. Pelatihan ini diharapkan dapat menstimulan atau merangsang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan budidaya ikan, guna terpenuhinya gizi keluarga dan kedepannya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk kesejahteraan hidup keluarga Sehingga bisa menghemat pengeluaran rumah tangga namun pemenuhan asupan gizi keluarga tetap terjaga dengan baik, karena bisa dengan mudah didapat dari hasil Budikdamber dan tidak menutup kemungkinan hasil Budikdamber jadi salah satu peluang usaha yang akan meningkatkan ekonomi keluarga.

- Sosialisasi GEMARIKAN 80 paket untuk anak TK Bunda Kreatuf di Kelurahan Tanjung Palas sebanyak 80 Paket olahan Ikan dan TK Babul Khoirah di Kelurahan Bukit Kapur, 100 paket olahan Ikan
- Sosialisasi GEMARIKAN pada peringatan Hari Ikan Nasional di Taman Bukit Gelanggang sebanyak 570 paket olahan ikan untuk anak PAUD se-Kota Dumai

Gambar 19 Kegiatan Pelatihan Budikdamber



3.5. CAPAIAN PILAR 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pilar 5 bertujuan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran. Pelaksanaan pilar ini diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu (1) publikasi tahunan angka penurunan *stunting*, (2) anggaran dan belanja pemerintah untuk pencegahan *stunting*, dan (3) pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.

A. Publikasi tahunan angka penurunan *stunting*

Publikasi data *stunting* Kota Dumai disampaikan pada kegiatan Rapat *Ekspose* Data Hasil Analisis Situasi *Stunting* Kota Dumai, kemudian pada Rapat Koordinasi Lurah, Camat, pada Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta pertemuan-pertemuan sosialisasi terkait *stunting*, serta Forum Rembuk *Stunting*. Adapun rangkuman publikasi *stunting* pada tingkat kota hingga kelurahan terlampir.

B. Anggaran dan belanja pemerintah untuk pencegahan *stunting*

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada

sasaran prioritas. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antartingkat pemerintahan dan masyarakat. Penanggulangan stunting tentunya membutuhkan keberpihakan regulasi dan dukungan anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menjabarkan penurunan *stunting* yang merupakan prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan prioritas daerah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Perencanaan program dan kegiatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Untuk meningkatkan keterpaduan/terintegrasinya berbagai program/kegiatan penanggulangan stunting maka perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data/informasi guna meningkatkan kesesuaian pengalokasian program/kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intervensi. Berikut penyajian data rencana dan realisasi program/kegiatan terkait intervensi spesifik dan sensitif di Kota Dumai pada Tahun 2023:

Tabel 5 Program dan Kegiatan terkait Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kota Dumai Tahun 2023

NO	URAIAN SUB KEGIATAN SESUAI RKA	TARGET LOKASI DALAM RENJA	LOKASI FOKUS	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	SUMBER DANA	OPD/PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	726.636.874	726.636.874	APBDP	DINAS KOMINFOTIKSAN
2	Pelayanan Informasi Publik	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	36.410.000	36.410.000	APBDP	DINAS KOMINFOTIKSAN
3	Jumlah Keluarga yang mengikuti lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	99.999.000	55.960.000	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN

4	Kelompok Tani Penerima Sarana Produksi pengembangan tanaman pekarangan pada kelurahan stunting	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	517.244.300	516.204.300	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Cetak Kartu Kontrol Minum TTD Remaja Putri dan Catin	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
6	Monitoring Tablet Tambah Darah Remaja Putri	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	4.500.000	4.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
7	Pemantauan Bulan Penimbangan Balita	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	9.000.000	9.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

8	Pemantauan dan Evaluasi Aksi Bergizi	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	4.500.000	4.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
9	Pemantauan Hasil Pemeriksaan Hb bagi Remaja Putri dan Catin	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	4.500.000	4.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
10	Pemantauan PMT Balita dan Ibu Hamil KEK	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	4.500.000	4.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
11	Stimulan Jamban	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	24.044.000	24.044.000	APBD	Dinas Kesehatan

12	Verifikasi STOP BABS	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	10.800.000	10.800.000	APBD	Dinas Kesehatan
13	Monev TTD pada Ibu Hamil	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	6.000.000	6.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
14	Supervisi ke Posyandu Pelaksanaan Imunisasi	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	7.200.000	7.200.000	APBD	Dinas Kesehatan
15	Deklarasi STOP BABS	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	15.600.000	15.600.000	APBD	Dinas Kesehatan

16	Sosialisasi KPM	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	28.745.000	28.685.000	APBD	DinsosPM
17	Bantuan Sosial Otonom	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	489.000.000	396.000.000	APBD	DinsosPM
18	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	2.080.000.000	900.941.035,61	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	9.295.174.614	1.431.624.391,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

20	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	1.020.940.000	375.000.000	APBD	DISPERKIMTAN
21	Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	147.030.119	147.024.000	APBD	DINAS PERIKANAN
22	Sosialisasi GEMARIKAN	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	74.999.300	74.999.300	APBD	DINAS PERIKANAN
23	Senam Ibu Hamil, Ambulance Rujukan Jamkesko, Operasional Transport Rumah Singgah (Belanja Bahan Bakar dan Pelumas)	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	123.680.000	127.225.319.285	APBD	RSUD

24	Rapat percepatan penurunan stunting, rapat rembuk stunting	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	58.584.453	58.584.453	APBD	Bappedalitbang
25	'1. Bimtek tentang Penanganan stunting tahap dasar pada anak PAUD 2, Bimtek tentang Penanganan stunting tahap lanjutan pada anak PAUD 3. Bimtek tentang Penanganan stunting tahap mahir pada anak PAUD 4, Sosialisasi ABK(Anak Berkebutuhan Khusus) PAUD 5. Program Pembagian bu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	96.460.431	96.460.431	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
26	"1. Sosialisasi gerakan transtasis PAUD - SD 2. Bimtek Penguatan transtasis PAUD - SD 3. Pembinaan PAUD HI Tingkat Kecamatan 4. Kegiatan Parenting orang tua dalam program PAUD HI 5. Monitorng dan Evaluasi terkait Program PAUD HI "	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	203.176.700	203.176.700	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

27	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	777.748.930	116.985.100	APBD	DPPKB
28	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	238.700.050	149.721.000	APBD	DPPKB
29	Operasional Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	907.200.000	15.816.800	APBN	DPPKB
30	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	31.401.400	37.200.000	APBD	DPPKB

31	"Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	49.993.300	49.990.000	APBD	DPPPA
32	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	53.640.000	55.800.000	APBD	KECAMATAN DUMAI BARAT
33	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	68.400.000	53.640.000	APBD	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
34	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	68.400.000	68.400.000	APBD	KECAMATAN DUMAI SELATAN

35	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	90.600.000	90.600.000	APBD	KECAMATAN DUMAI TIMUR
36	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	54.540.000	54.540.000	APBD	KECAMATAN BUKIT KAPUR
37	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	95.112.000	95.112.000	APBD	KECAMATAN DUMAI KOTA
38	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Kota Dumai	Bagan Besar,Bukit Kayu Kapur,Guntung,Teluk Makmur,Basilam Baru,Purnama,Simpang Tetap Darul Ihsan,Bagan Keladi,Jaya Mukti,Teluk Binjai	64.800.000	15.300.000	APBD	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Sumber: Master Ansit Bina Bangda, 2023

C. Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala

Sistem monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dari pelaksanaan program. Fungsinya untuk menjamin adanya *data real time* sehingga mendapatkan umpan balik yang konstruktif terhadap program dengan segera. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan utama bagi Pemerintah Kota Dumai dalam upaya percepatan penurunan stunting. Saat ini, Pemerintah Kota Dumai memanfaatkan aplikasi/ situs *web monitoring* <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/> milik Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam pelaporan pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting.

BAB 4

INOVASI DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Percepatan Pencegahan *Stunting* tidak hanya dilakukan melalui intervensi melalui perangkat daerah terkait namun juga diupayakan dengan membuat inovasi dan menunjukkan praktik baik dalam aksi pencegahan *stunting*. Inovasi yang dilaksanakan diharapkan dapat membantu menekan angka *stunting* di Kota Dumai sekaligus membawa perubahan perbaikan gizi dan dapat menurunkan *stunting* di masing-masing wilayah. Inovasi juga diharapkan dapat menghasilkan revolusi perubahan *mindset* untuk mengubah tatanan dan cara-cara baru menyebarkan informasi secara menyeluruh. Di Kota Dumai terdapat beberapa inovasi terkait percepatan pencegahan *stunting* diantaranya :

1) GELANG ANTING SEJULUR (GERAKAN LANGSUNG ATASI STUNTING DENGAN SEJUMLAH TELUR)

Pemerintah Kota Dumai juga melaksanakan inovasi program **GELANG ANTING SEJULUR – GERAKAN LANGSUNG ATASI STUNTING DENGAN SEJUMLAH TELUR**. Dimana sasaran utamanya adalah para baduta dan balita *stunting*. GELANG ANTING SEJULUR merupakan kegiatan inovasi dari TPPS Kota Dumai dengan memberikan bantuan telur 1 anak 1 papan telur setiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan. Kegiatan ini di promotori oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Dumai untuk memberikan bantuan telur.

Telur merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Kegiatan gerakan makan telur ini berpola pada pemenuhan konsumsi sumber zat gizi berasal dari hewani. Pendistribusian telur tersebut telah dilaksanakan pada semester 2 (dua) Tahun 2023. Berikut beberapa dokumentasi dan publikasi kegiatan GELANG ANTING SEJULUR.

Gambar 20 Pemberian Telur pada Inovasi Gelang Anting Sejulur



2) PELITA BERANTING

Forum Masyarakat yang terdiri dari Masyarakat yang Peduli Kita Berantas Stunting yang bertujuan membantu Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan

efektifitas peran Masyarakat sebagai upaya percepatan penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Memastikan remaja putri sudah mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet per minggu dengan memastikan Kartu Kepatuhan Obat serta memastikan remaja putri tersebut menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)
- Mendorong agar orang tua membekali anak sekolah dengan bekal makanan sehat seimbang sesuai ISI PIRINGKU
- Memastikan Calon Pengantin sudah menerima Tablet Tambah Darah (TTD) dan mengkonsumsinya 1 tablet/minggu, memastikan calon pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan ke tenaga Kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pra nikah serta memastikan calon pengantin sudah menerima pendampingan Kesehatan reproduksi dan edukasi sejak 3 bulan pra nikah
- Memastikan Ibu Hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap (6 kali pemeriksaan ke tenaga Kesehatan) selama kehamilan, memastikan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat asuoan gizi dan Ibu Hamil mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) selama 9 bulan kehamilan sejumlah 90 tablet.
- Mendorong Ibu Bayi yang berusia 0 – 6 bulan untuk tetap memberikan ASI secara eksklusif, dan anak 6 – 23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI sesuai pedoman Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak (PMBA) serta balita mendapat imunisasi secara lengkap.
- Mendorong Ibu Balita agar selalu ke posyandu memantau pertumbuhan dan perkembangan balita
- Memastikan Balita dengan Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Wasting) serta Balita dengan Status Gizi Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) sudah mendapat Tata Laksana Gizi sesuai ketentuan.

Gambar 21 Kegiatan Forum Pelita Beranting



3) BUKU RESEP PMT LOKAL

Tujuan Menjadi Referensi dalam pengolahan makanan tinggi protein sesuai kebutuhan gizi bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, yang berasal dari bahan pangan yang tersedia dan mudah di peroleh di wilayah setempat dengan harga terjangkau

Inovasi ini juga bagian dari kolaborasi Tim Penggerak PKK Kota Dumai bersama PERSAGI (Perhimpunan Ahli Gizi) Kota Dumai.

Gambar 22 Gambar Buku Resep PMT Lokal

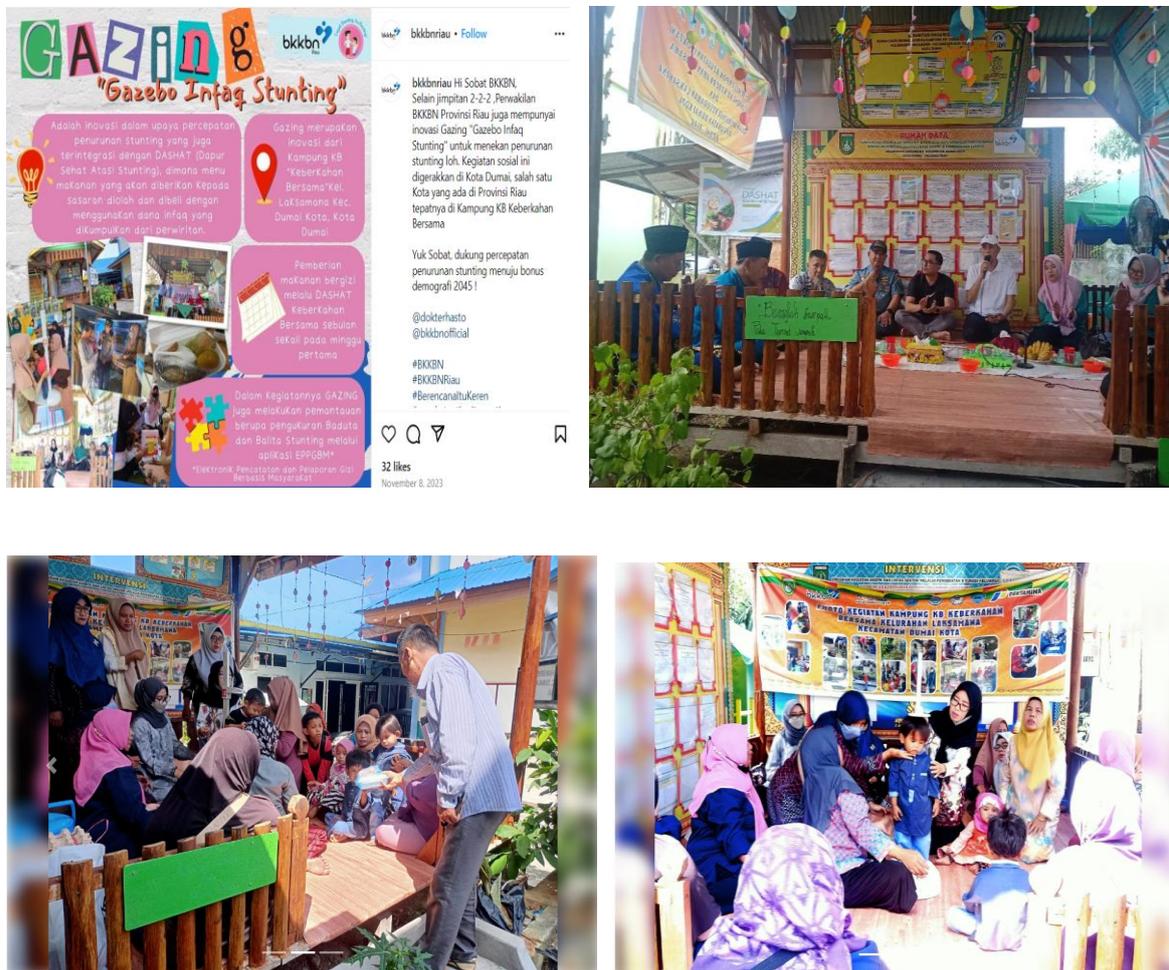


4) GAZING

Gazebo Infaq Stunting adalah inovasi dalam Upaya percepatan penurunan stunting yang juga terintegrasi dengan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dimana menu makanan yang akan diberikan kepada sasaran diolah dan diberikan dengan menggunakan dana infaq yang di kumpulkan dari perwritan Kecamatan Dumai Kota. Pemberian makanan bergizi melalui DASHAT keberkahan Bersama sebulan sekali pada minggu pertama.

Dalam kegiatannya GAZING juga melakukan pemantauan berupa pengukuran Baduta dan Balita Stunting melalui aplikasi E-PPGBM.

Gambar 23 Kegiatan Gazebo Infaq Stunting



5) SI KOMPANG MERDU

Si Kompang Merdu (Aplikasi Kolaborasi dalam Pembangunan untuk Merapikan Kota Dumai) yang merangkul Forum TJSL bertujuan mengakomodir usulan Pembangunan Masyarakat yang belum terakomodir oleh APBD Kota Dumai namun sudah menjadi bagian dari

dokumen rencana kerja pemerintah daerah termasuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting atau tengkes.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Dumai dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dilakukan penandatanganan komitmen oleh setiap OPD yang terlibat percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Gambar 24 Kegiatan Launching Aplikasi Si Kompang Merdu



6) KATA BABA (Kader Cinta Bayi dan Balita)

Tujuan Meningkatkan kesadaran ibu balita akan pentingnya datang ke posyandu sehingga dapat meningkatkan kunjungan posyandu, meningkatkan cakupan imunisasi, deteksi dini cegah stunting, terpantaunya tumbuh kembang balita dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara kader dan ibu balita.

Kegiatan yang dilakukan :

- Melakukan sweeping ke rumah-rumah balita. Hal ini dilakukan jika balita tidak datang ke posyandu.
- Memantau tumbuh kembang balita, serta mengidentifikasi penyebab balita tidak datang ke posyandu,
- Pemberian bingkisan menarik, bagi balita yang datang ke posyandu. Bingkisan yang diberikan berupa kudapan atau cemilan untuk balita Dengan adanya bingkisan ini, balita menjadi senang dan bersemangat untuk datang ke posyandu.

7) CHAT MIL (Chating Ibu Hamil)

Tujuan Grup Whatsapp yang terdiri dari kader, nakes, ibu hamil serta PKK yang bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan yang diperlukan selama kehamilan, saat melahirkan dan masa pasca persalinan, dan juga mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Kegiatan yang dilakukan

- A. Kader membuat grup obrolan dalam aplikasi whatsapp.
- B. Kader mengundang ibu-ibu hamil yang ada di wilayah kerja Posyandu Tenggara untuk bergabung dalam grup whatsapp.
- C. Kader melakukan pemantauan kesehatan bumil dengan cara chatting di dalam grup, misalnya menanyakan kondisi ibu hamil saat ini.
- D. Kader memberikan edukasi dan menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh ibu hamil, seperti menyampaikan jadwal kelas bumil,
- E. Ibu hamil dapat saling melakukan sharing mengenai pengalaman mereka selama kehamilan, persalinan, dll.

8) KAWASAN KEPITING (Kawasan Kenali Peduli Stunting)

Tujuan Merupakan suatu Gerakan yang terintegrasi dari seluruh sektor yang ada di wilayah kerja Puskesmas Dumai Barat mulai dari kader, RT, kelurahan, kecamatan TP PKK, DPPKB, KUA, DKPP, Dinas Perikanan, Nakes, sekolah dan masyarakat bersama sama berupaya untuk menurunkan angka stunting.

Kegiatan yang dilakukan :

- 1. Langit Remaja penanggulangan stunting oleh remaja): Pember tablet tambah darah kepada remaja putri oleh PKPR
- 2. Memberikankartu pintar ke calon pengantin yang telah mendapatkan tablet tambah darah dan mengikuti konseling pra nikah
- 3. Melakukan pemantauan konsumsi tablet tambah darah dannutrisi pada saat kelas ibu hamil terutama ibu hamil yang risiko tinggi dan memastikan ibu hamil untuk selalu melakukan ANC secara lengkap
- 4. Memberikan PMT lokal pada bayi dan balita yang menderita pendek dan sangat pendek:
- 5. Memberikan bahan makanan berupa I papan I telur oleh tim peduli
- 6. Pemantauan status gizi dilakukan sebulan sekali oleh petugas puskesmas di posyandu balita masing- masing.
- 7. Evaluasi tumbuh kembang balita dilakukan oleh petugas Puskesmas tiap triwulan.

9) ONE DAY ONE EGG (Satu Hari Satu Butir Telur)

Tujuan Penurunan dan pencegahan kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan.

Kegiatan yang di lakukan:

- Melakukan skrining dan pelacakan kasus di wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan
- Berkoordinasi lintas profesi medis dalam tata laksana bagi anak yang ditemukan masalah gizi
- Melakukan pemberian telur (one day one egg) pada anak stunting
- Melakukan pemantauan BB/TB 1 bulan sekali pada anak stunting.

10) PERIAS (Perkumpulan Perwiritan Peduli Atasi Stunting)

Tujuan kelompok Perwiritan yang bertujuan melakukan pengumpulan dana dan uang tersebut akan di Kelola untuk pMT anak Stunting

Kegiatan yang di lakukan :

1. Melakukan pengumpulan dana swadaya Masyarakat
2. Memberikan PMT terhadap Balita Stunting

11) KOMUNITAS SIGAP STUNTING (Komunitas Aksi Cegaj dan Penanggulangan Stunting)

Tujuan Merupakan upaya terpadu semua sektor terkait yang ada di wilayah Puskesmas untuk menurunkan angka kejadian stunting diwilayah kerja.

Kegiatan yang dilakukan

1. Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri oleh petugas puskesmas sekali seminggu
2. Memberikan sertifikat ke calon pengantin yang telah mendapatkan tablet tambah darah dan mengikuti konseling pra nikah
3. Melakukan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada saat kelas ibu hamil terutama ibu hamil yang risiko tinggi dan memastikan ibu hamil untuk selalu melakukan ANC secara lengkap
4. Memberikan PMT lokal pada bayi dan balita yang menderita pendek dan sangat pendek:
5. Memberikan bahan makanan berupa I papan I telur oleh RELAWAN
6. Pemantauan status gizi dilakukan sebulan sekali oleh petugas puskesmas di posyandu balita masing- masing

12) RAMAI CERITA (Remaha Dumai Cerdas Ceria Tanpa Anemi)

Tujuan menyampaikan pesan melalui flashmop kepada remaja putri dikota Dumai

serta meningkatkan minat remaja putri untuk mengkonsumsi TTD

Kegiatan yang dilakukan menampilkan Flashmop Anemia di setiap moment kegiatan untuk sosialisasi serta menerapkan Aksi Bergizi secara rutin di setiap event kesehatan baik di sekolah maupun diluar sekolah

13) YANDU CATIN (Pelayanan Terpadu Calon Pengantin)

Tujuannya meningkatkan akses dan pengetahuan calon pengantin (catin) tentang persiapan nikah.

Kegiatn yang dilakukan adalah :

- KIE Kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di luar Gedung (KUA dan Lembaga agama lainnya sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KIE Kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin didalam Gedung
- Memberikan buku pedoman calon pengantin dan Buku KIA secara dini

14) REMATRI SI DARA MANIS (Remaja Putri Konsumsi Tablet Tambah Darah Mencegah Anemia secara Gratis)

Tujuannya memotivasi dan mendorong rematri di lingkungan SMP/MTs dan SMA/SMA di wilayah Puskesmas Medang Kampai untuk minum tablet tambah darah secara rutin.

Kegiatn yang dilakukan adalah :

- Pemeriksaan HB pada Remaja Putri
- Penyuluhan
- Minum Tablet Tambah Darah bersama

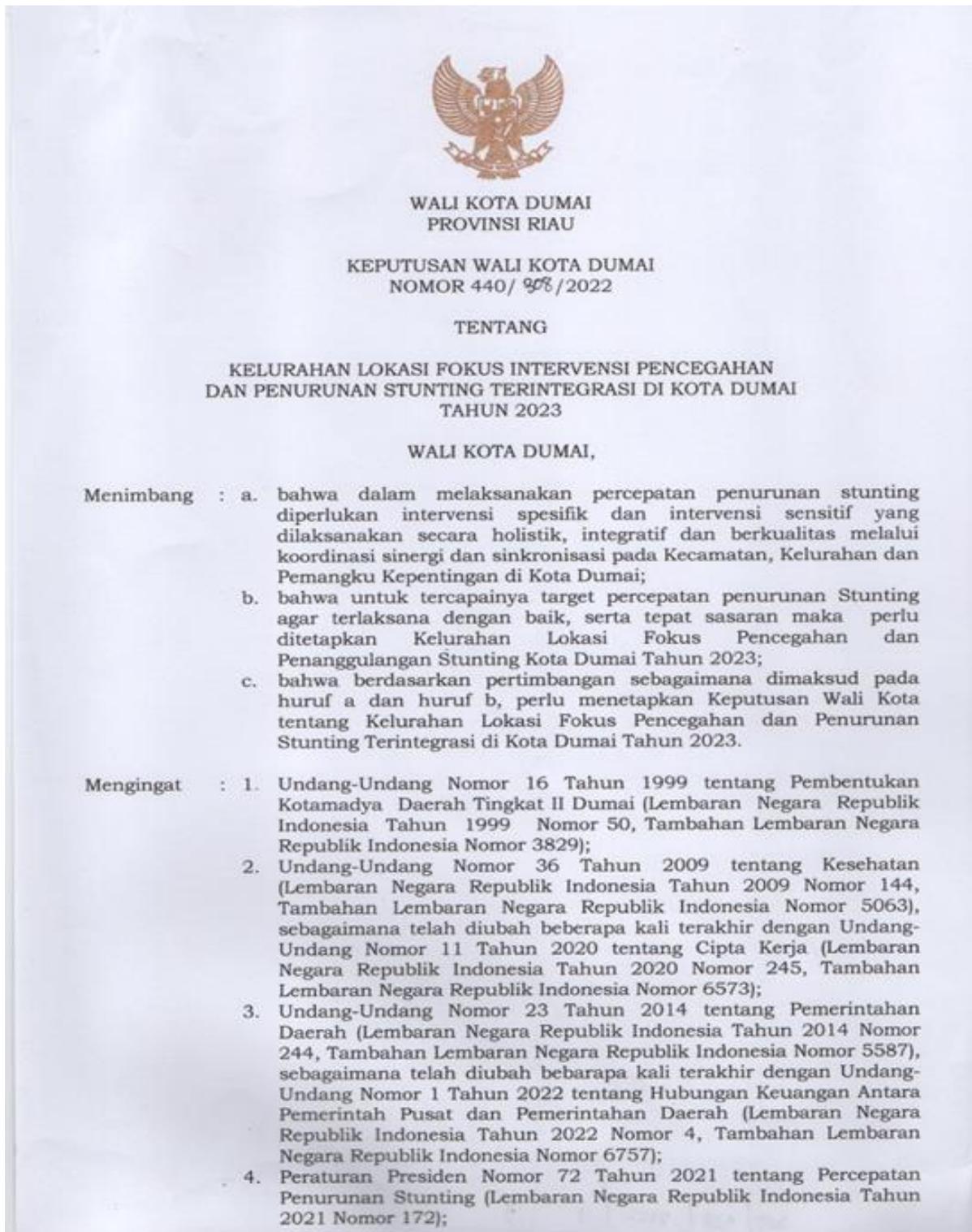
BAB 5

PENUTUP

Laporan Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kota Dumai Semester II Tahun 2023 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang capaian pelaksanaan program percepatan pencegahan *stunting*. Selain itu, laporan ini juga memberikan gambaran tentang tantangan dalam pelaksanaan program. Beberapa hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Stranas telah diupayakan solusi pemecahan dengan adanya sejumlah rekomendasi dalam laporan ini. Rekomendasi diperlukan sebagai salah satu acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, agar upaya percepatan pencegahan *stunting* dapat mencapai target yang diharapkan.

LAMPIRAN

A. Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 440/378/2022 tentang Lokasi Kelurahan Prioritas Penurunan Stunting Kota Dumai Tahun 2023



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA DUMAI TAHUN 2023.

KESATU : Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Dumai Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
- b. Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
- c. Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
- d. Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Dumai;
- e. Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Dumai;
- f. Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Dumai;
- g. Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Dumai;
- h. Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Dumai;
- i. Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai; dan
- j. Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai.

KEDUA : Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan intervensi bersama dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Dumai Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal Maret 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

B. Surat Keputusan Wali Kota Dumail Nomor 443/005.2/2023 Tentang Perubahan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Dumai



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 443/005.2/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 444/279/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KOTA DUMAI TAHUN 2023

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Dumai melaksanakan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, agar pelaksanaan dapat berjalan optimal perlu dibentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Dumai tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 444/279/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai Tahun 2023.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 5 Seri A);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 61 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 444/27/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA DUMAI TAHUN 2023.

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar perangkat daerah dan kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
 2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, Kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting*, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan;
 5. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor;
 6. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki peran sebagai berikut:
- a. Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* melalui :
 1. mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* Kecamatan dan Kelurahan;
 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. optimalisasi fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

4. pembuatan persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain;
 5. sebagai pemimpin rembuk Stunting 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. Sekretaris pelaksana bertugas :
1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan;
 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim.
- d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan melalui :
1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
 2. mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting;
 3. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko;
 4. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran;
 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui :
1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran.

2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting secara berkelanjutan;
 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran;
 5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
 2. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
 3. melaksanakan rembuk Stunting;
 4. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan dan Kelurahan;
 5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- g. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik Kota Dumai, data Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, Sistem Pendataan Stunting Nasional yang ada di Kota Dumai, seperti e-Human Development Worker dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting;
 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting;

4. melaksanakan Audit Kasus Stunting;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi di Tingkat Kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
6. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juli 2023

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 444 / 359 / 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 WALKOTA DUMAI NOMOR 444/27/2023
 TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA DUMAI
 TAHUN 2023

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA DUMAI
 TAHUN 2023

1. TIM PENGARAH.

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALI KOTA DUMAI	KETUA
2	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA

2. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI	KETUA
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
3	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
4	KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
5	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIS
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF		
6	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	KOORDINATOR
7	KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
8	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DR. SUHATMAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
11	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI	ANGGOTA
12	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
13	KEPALA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
14	KABID KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
15	UTERI, NOVIDAR, S.ST (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
16	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN, DAN PENGGERAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	KOORDINATOR

17	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, INFORMAL, PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
18	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
19	NELLY SUSANTI, SKM (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
20	KETUA KELOMPOK KERJA IV TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	ANGGOTA
21	KETUA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA KOTA DUMAI	ANGGOTA
22	KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
23	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI	KOORDINATOR
24	KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
25	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
26	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
27	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
28	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPEDALITBANG	ANGGOTA
29	KEPALA BIDANG PELAYANAN RSUD KOTA DUMAI	ANGGOTA
30	SYAFRINAM SK, M.Si (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
31	ULFAH YANI (KASUBAG TU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
32	AYU ELLY SAYANTI, SKM (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN <i>KNOWLEDGE MANAGEMENT</i>		
33	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	KOORDINATOR
34	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDALITBANG	ANGGOTA
35	KABID PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
36	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	ANGGOTA
37	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
38	KEPALA BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
39	KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI	ANGGOTA
40	MURNI RAHMADANI, SKM, M.Si (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
41	DEWI ROSA, SKM, MA (PERENCANA MADYA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
42	DYAH PAMELIA RUWAIDA, S.T (PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA LOKA POM KOTA DUMAI	ANGGOTA

43	KARTINI SARI DEWI, S.Pi, M.Si (PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA) DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
44	DIREKTUR AKADEMI PERAWATAN SRI BUNGA TANJUNG KOTA DUMAI	ANGGOTA
45	KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING KOTA DUMAI	ANGGOTA
46	DIREKTUR UNIVERSITAS DUMAI	ANGGOTA
SEKRETARIAT PELAKSANA		
47	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	KETUA
48	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
49	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
50	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINSOS KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
51	SUHARTATI, SKM (PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA) DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
52	UTERI, NOVIDAR, S.ST (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
53	ZULFALENI, SKM (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
54	ELSYA, S.ST (PENGADMINISTRASIAN PERENCAAN DAN PROGRAM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
55	TENGGU HARUN ARASYID, Amd.Kep (PENGADMINISTRASIAN UMUM)	SEKRETARIAT
56	ELCHA SESTI, S.ST (PENATA NUTRISIONIS AHLI MUDA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
57	SRI MAWARTI, SKM, M.Si (PERENCANA AHLI MUDA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DUMAI)	SEKRETARIAT
58	SYARIFAH UMIDA, A.Md (PENGELOLA DATA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DUMAI)	SEKRETARIAT
59	SUBKOORDINATOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
60	SYAFRINA, SKM, M.Si (PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
61	DINOK MARIANA (TECHNICAL ASISTANT SATGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
62	GREISSANITA JULI, S.M (STAF ADMINITRASI)	SEKRETARIAT
63	RIZKIAH RAHMAH, A.md.Kom STAF (ADMINITRASI)	SEKRETARIAT

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

C. Lampiran Capaian Indikator Tim Percepatan Penurunan Stunting Semester II Kota Dumai Tahun 2023

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN		NUMERATOR/CAPAIAN		CAKUPAN (%)	PADANAN MASTER ANSIT	OPD PENANGGUNG JAWAB
I.	Blok 1 : Capaian Perpres Lampiran A							
I.A.	Blok 1A : Indikator Intervensi Spesifik							
1	Indikator 1 : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Ibu Hamil yang diukur	297	Jumlah ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi	297	100%	Indikator Esensial No. 10	DINKES
2	Indikator 2 : Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah Ibu Hamil	9.590	Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan	7.110	74%	Indikator Esensial No. 11	DINKES
3	Indikator 3 : Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah remaja putri	15.119	Jumlah remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	13.315	88%	Indikator Esensial No. 1	DINKES
4	Indikator 4 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Jumlah Baduta Usia 0-6 Bulan	4.359	Jumlah Baduta 0-6 yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	2.423	56%	Indikator Esensial No. 14	DINKES
5	Indikator 5 : Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Jumlah baduta usia 6 - 23 bulan	3.937	Jumlah baduta usia 6 - 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI	3.715	94%	Indikator Esensial No. 15	DINKES
6	Indikator 6 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Jumlah Balita Gizi buruk 0-59 bulan	13	Jumlah Gizi buruk pada bayi 0-59 bulan yang mendapat tata laksana	13	100%	Indikator Esensial No. 16	DINKES
7	Indikator 7 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Balita usia 0-59 bulan	44.931	Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	35.003	78%	Indikator Esensial No. 17	DINKES
8	Indikator 8 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Jumlah anak usia 6-59 bulan	172	Jumlah anak usia 6-59 bulan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	172	100%	Indikator Esensial No. 18	DINKES
9	Indikator 9 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah anak usia 0-11 bulan	8.718	Jumlah balita yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	7.335	84%	Indikator Esensial No. 19	DINKES

I.B.	Blok 1B : Intervensi Sensitif							
1	Indikator 1 : Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Jumlah persalinan (data PK)	2598	Jumlah peserta KB pasca persalinan	1876	72,2%	Indikator Esensial No. 23	DPPKB
2	Indikator 2 : Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Ibu Hamil (data PK)	1053	Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan	116	11,02 %	Indikator Esensial No. 13	DPPKB
3	Indikator 3 : Cakupan calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Jumlah calon pengantin (Catin)	1841	Jumlah catin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	1.841	100%	Indikator Esensial No. 4	DPPKB
4	Indikator 4 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	92676	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88042	0,95	Indikator Esensial No. 26	PUPR
5	Indikator 5 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	92676	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86188	93%	Indikator Esensial No. 27	PUPR
6	Indikator 6 : Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan	Jumlah keluarga miskin dan tidak mampu (Desil 1-4) dengan iuran JKN dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah (data PK22)	265.101		103498	39%	Indikator Supply No. 4	BPJS
7	Indikator 7 : Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	12855	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	10284	80%	Indikator Esensial No. 24	DPPKB
8	Indikator 8 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Jumlah Keluarga miskin memperoleh bantuan tunai melalui PKH (Program Keluarga Harapan)	6.935		6.935	100%	Indikator Supply No. 33	DINSOS PM
9	Indikator 9 : Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui	12855	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan konseling dari tim TPK	10284	80%	Indikator Supply No. 17	DPPKB

10	Indikator 10 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	11.442		11.442	100%	Indikator Supply No. 34	DINSOS PM
11	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	34	94%	Indikator Supply No. 16	DINKES
II.	Blok 2 : Capaian Perpres Lampiran B							
II.A	Blok 2A : Indikator Pilar 1							
2	Indikator 2 : Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Apakah terselenggara rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota?	Ya/Tidak	Jumlah rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	Ya	Ya	Indikator Supply No. 1	BAPPEDA
3	Indikator 3 : Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Apakah terselenggara rembug Stunting tingkat kecamatan?	Ya/Tidak	Jumlah penyelenggaraan rembug Stunting tingkat kecamatan	Ya	Ya	Indikator Supply No. 2	BAPPEDA
4	Indikator 4 : Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	Apakah tersedia kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 5	DINSOS PM
5	Indikator 5 : Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah Desa yang memiliki bidan desa	36	100%	Indikator Supply No. 22	DINKES
6	Indikator 6 : Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	4	11%	Indikator Supply No. 12	DINKES
8	Indikator 8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Provinsi No. 3	BAPPEDA

9	Indikator 9 : Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	36	100%	Indikator Supply No. 6	DINSOS PM/DPPKB
10	Indikator 10 : Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Jumlah pendamping PKH mengikuti pelatihan secara kumulatif hingga tahun berjalan	22		22	100%	Indikator Supply No. 35	DINSOS PM
11	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	36	100%	Indikator Supply No. 7	DINSOS PM
II.B. Blok 2B : Indikator Pilar 2								
1	Indikator 1 : Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Apakah terlaksana kampanye nasional pencegahan Stunting?	Ya/Tidak	Jumlah pelaksanaan kampanye nasional pencegahan Stunting	Ya	Ya	Indikator Supply No. 31	DPPKB/DINKES
2	Indikator 2 : Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah keluarga terdata	100.336	Jumlah keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	85.413	85%	Indikator Esensial No. 20	DINKES
3	Indikator 3 : Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah keluarga terdata	32.622	Jumlah keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	16.215	50%	Indikator Esensial No. 21	DINKES
6	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting	20	56%	Indikator Supply No. 29	DISDIK
7	Indikator 7 : Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Jumlah Lembaga PAUD terdaftar	111	Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	102	92%	Indikator Supply No. 30	DISDIK

8	Indikator 8 : Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Apakah dilakukan penguatan kapasitas posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 20	DINKES
9	Indikator 9 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	36	100%	Indikator Supply No. 27	DPPKB
10	Indikator 10 : Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	6.935	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan Gizi keluarga	6.935	100%	Indikator Esensial No. 28	DINSOS PM
11	Indikator 11 : Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	25	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	25	100%	Indikator Supply No. 26	DPPKB
12	Indikator 12 : Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Apakah terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 14	DPPKB/KEM ENAG
13	Indikator 13 : Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	Jumlah catin	1838	Jumlah catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	514	28%	Indikator Esensial No. 6	KEMENAG
I.I.C.	Blok 2C : Indikator Pilar 3							

1	Indikator 1 : Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Apakah kabupaten/kota mengintegrasikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Provinsi No. 2	BAPPEDA
2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Apakah kabupaten/kota melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Provinsi No. 1	BAPPEDA
3	Indikator 3 : Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah Desa/Kelurahan urahan ngintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJMDes, RKPDes, APBDes,RKA Desa)	36	100%	Indikator Supply No. 8	BAPPEDA
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	20	56%	Indikator Supply No. 9	BAPPEDA
5	Indikator 5 : Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis,cakupan dan kualitas intervensi gizi	36	100%	Indikator Supply No. 10	BAPPEDA

				bagi sasaran keluarga berisiko stunting				
6	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	36	100%	Indikator Supply No. 15	DINKES
7	Indikator 7 : Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Calon Pengantin	1.854	Jumlah Calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah	1.841	99%	Indikator Esensial No. 3	DINKES
14	Indikator 14 : Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 32	BPOM/KETA PANG
15	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Provinsi No. 6	PPA
16	Indikator 16 : Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	10284	80%	Indikator Esensial No. 24	DPPKB
17	Indikator 17 : Cakupan calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	Jumlah calon pengantin	1189	Jumlah calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	1099	92,4%	Indikator Esensial No. 5	DINKES
18	Indikator 18 : Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah remaja putri	15.119	Jumlah remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	4.414	29%	Indikator Esensial No. 2	DINKES
19	Indikator 19 : Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Apakah tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 24	DPPKB

20	Indikator 20 : Persentase kabupaten/kota dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Angka Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) kabupaten/kota			13 per 1000 Kelahiran	0,3%	Indikator Supply No. 28	DPPKB
21	Indikator 21 : Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Jumlah pelayanan keluarga berencana	2598	Jumlah pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	1876	72%	Indikator Esensial No. 23	DPPKB
22	Indikator 22 : Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	Jumlah seluruh PUS	45899	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB	5977	13%	Indikator Esensial No. 12	DPPKB
II.D.	Blok 2D : Indikator Pilar 4							
1	Indikator 1 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	12.855	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	250	2%	Indikator Esensial No. 25	KETAPANG
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Jumlah keluarga berisiko stunting	12.855	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	80	1%	Indikator Esensial No. 22	DISKAN
3	Indikator 3 : Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta)	11442	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta) yang mendapat program selain Program Sembako	132	1%	Indikator Esensial No. 29	DINSOS PM
4	Indikator 4 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6.935	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	2.774	40%	Indikator Esensial No. 7	DINSOS PM

5	Indikator 5 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	11442	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BPNT	8009	70%	Indikator Esensial No. 8	DINSOS PM
6	Indikator 6 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan nasional	44.945	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23.504	52%	Indikator Esensial No. 9	DINKES/BPJS
7	Indikator 7 : Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	Jumlah pelaku usaha pangan fortifikasi	4	Jumlah Pelaku usaha pangan fortifikasi yang menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda	4	100%	Indikator Supply No. 23	BPOM
II.E. Blok 2E : Indikator Pilar 5								
3	Indikator 3 : Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota.	Apakah dilakukan publikasi data Stunting di tingkat kabupaten/kota?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 18	DINKES/DPPKB
6	Indikator 6 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Apakah terselenggara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota?	Ya/Tidak	Jumlah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Ya	Ya	Indikator Supply No. 3	BAPPEDA
7	Indikator 7 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Jumlah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa	2		2	100%	Indikator Supply No. 11	BAPPEDA
8	Indikator 8 : Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Apakah terselenggara audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting?	Ya/Tidak	Jumlah penyelenggaraan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Ya	Ya	Indikator Supply No. 21	DPPKB

11	Indikator 11 : Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Apakah tersedia data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)?	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 25	DPPKB
13	Indikator 13 : Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Ya/Tidak		Ya	Ya	Indikator Supply No. 19	DINKES
15	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Apakah kabupaten/kota menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi?	Ya/Tidak		Ya	Ya		<u>DPPKB/PER GURUAN TINGGI</u>
III.	Blok 3 : Capaian RAN PASTI							
III.A.	Blok 3A : Indikator RAN PASTI Kluster Manajerial							
1	Indikator 1 : Persentase kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Apakah kabupaten/kota meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya?	Ya/Tidak		Ya	Ya		<u>BAPPEDA</u>
2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Apakah kabupaten/kota mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif?	Ya/Tidak		Ya	Ya		<u>BAPPEDA</u>

3	Indikator 3 : Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Apakah ada temuan dari hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Ya/Tidak		Tidak	Tidak		<u>BAPPEDA</u>
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	20	56%		<u>BAPPEDA</u>
								-
III.B.	Blok 3B : Indikator RAN PASTI Kluster Operasional							-
1	Indikator 1 : Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	36	100%		<u>DPPKB</u>
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	Jumlah keluarga berisiko stunting	60974	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	71282	85,5%		<u>DPPKB</u>
3	Indikator 3 : Cakupan catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	Jumlah catin	1.330	Jumlah catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	1.330	100%		<u>DPPKB</u>
4	Indikator 4 : Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting	Apakah kabupaten/kota memiliki tim audit Stunting?	Ya/Tidak		Ya	Ya		<u>DPPKB</u>
5	Indikator 5 : Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	2		2	100%		<u>DPPKB</u>
6	Indikator 6 : Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	110		58	53%		<u>DPPKB</u>

7	Indikator 7 : Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	2		2	100%		<u>DPPKB</u>
9	Indikator 9 : Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting	12.855	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	6.935	54%		<u>DINSOS PM/DPPKB</u>
10	Indikator 10 : Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah catin anemia	2	Jumlah catin anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah (TTD)	2	100%		<u>DINKES</u>
11	Indikator 11 : Persentase catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Jumlah catin	1.330	Jumlah catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	1.330	100%		<u>DINKES</u>
12	Indikator 12 : Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan	Jumlah Ibu hamil PJT	-	Jumlah Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana	-	-		<u>DINKES</u>
13	Indikator 13 : Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan	Jumlah Ibu hamil	3051	Jumlah ibu hamil yang menerima pendampingan	3.431	112%		<u>DINKES</u>
15	Indikator 15 : Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang gizi buruk	4	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	4	100%		<u>DINKES</u>
16	Indikator 16 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni	Jumlah keluarga berisiko stunting	12.855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni	46	0,4%		<u>PERKIM</u>
17	Indikator 17 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat	Jumlah keluarga berisiko stunting	12.855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat	981	7,6%		<u>DINKES</u>
18	Indikator 18 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai air minum layak	Jumlah keluarga berisiko stunting	12.855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak	3.780	29,4%		<u>DINKES</u>
20	Indikator 20 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	83	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	83	100%		<u>DINKES</u>

21	Indikator 21 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	83	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi	83	100%		<u>DINKES</u>
22	Indikator 22 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis	71	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	71	100%		<u>DINKES</u>
23	Indikator 23 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	6756	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	6.568	97%		<u>DPPKB</u>
24	Indikator 24 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	4.359	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	2.423	56%		<u>DINKES</u>
25	Indikator 25 : Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	36	100%		<u>DPPKB</u>
26	Indikator 26 : Persentase TPK yang mendapatkan orientasi	Jumlah TPK	432	Jumlah TPK yang mendapatkan orientasi	432	100%		<u>DPPKB</u>
28	Indikator 28 : Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	82	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	82	100%		<u>DINKES</u>
29	Indikator 29 : Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard		8.088	Jumlah Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	8.043	99%		<u>DINKES</u>
30	Indikator 30 : Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-23 bulan	8.088	Jumlah Balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	5.868	73%		<u>DINKES</u>
31	Indikator 31 : Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	19.162	Jumlah Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	18.977	99%		<u>DINKES</u>
32	Indikator 32 : Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	44.931	Jumlah Balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	35.003	78%		<u>DINKES</u>

33	Indikator 33 : Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	Jumlah desa prioritas	36	Jumlah desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	36	100%		<u>DINKES/DPP</u> <u>KB</u>
----	--	-----------------------	----	---	----	------	--	--------------------------------

